

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Andreas Suryo Adi

NIM: 082114001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2012

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Andreas Suryo Adi

NIM: 082114001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2012

Skripsi

ANALISIS POTENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010



Oleh :

Andreas Suryo Adi

NIM: 082114001

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firma'.

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal: 6 Juli 2012

S k r i p s i

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Andreas Suryo Adi
NIM : 082114001

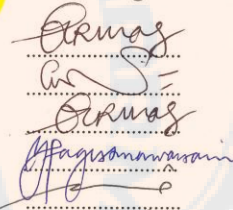
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Juli 2012
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

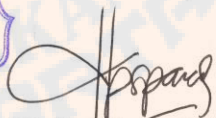
Nama Lengkap

Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota	Dra. YFM. Giem Agustinawansari, M.M., Akt
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si

Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Juli 2012
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan

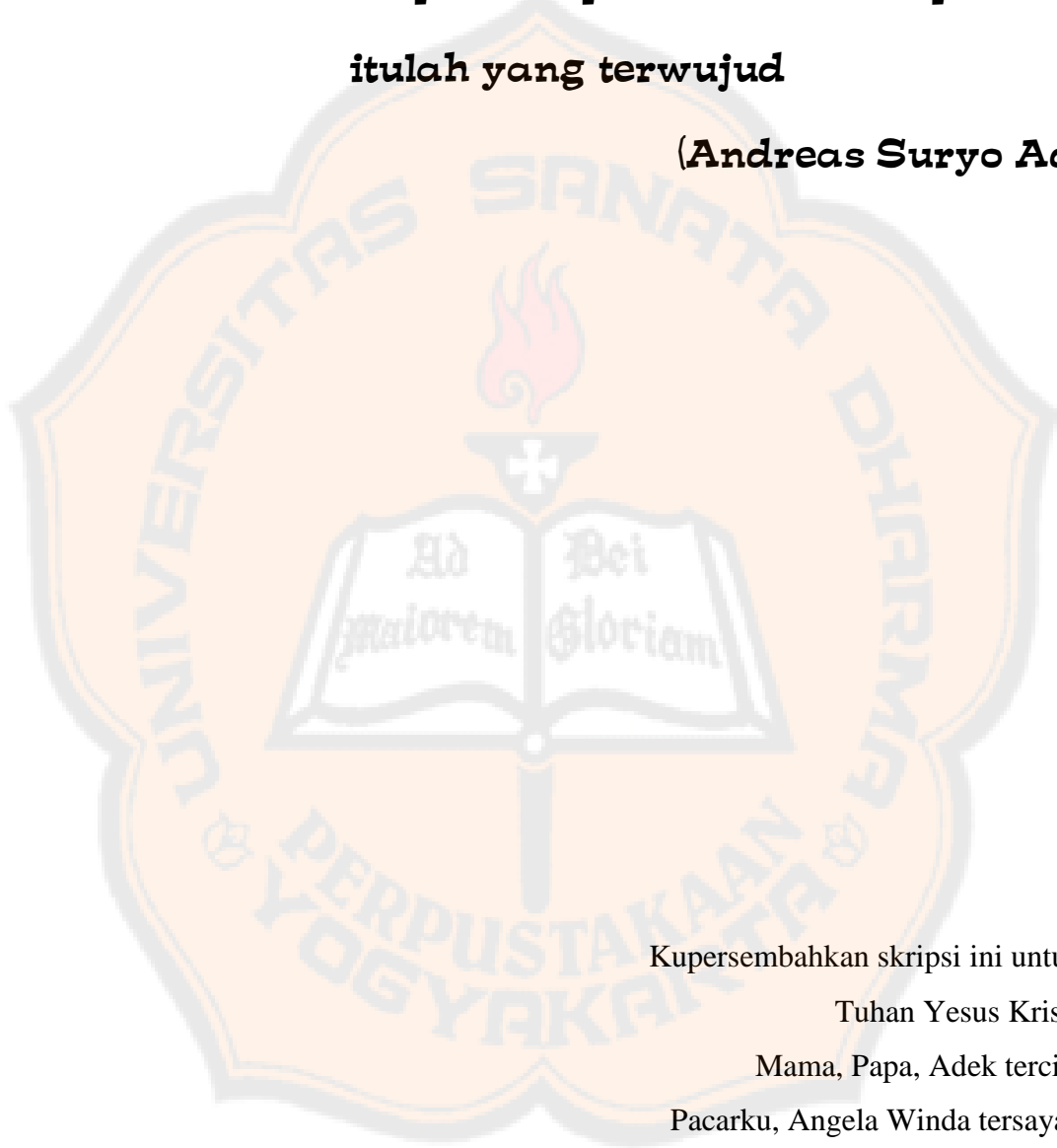


Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Motto dan Persembahan

**Tidak pernah letih untuk selalu berpikir positif,
karena melalui pikiran positif maka hal positif
itulah yang terwujud**

(Andreas Suryo Adi)



Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Tuhan Yesus Kristus

Mama, Papa, Adek tercinta

Pacarku, Angela Winda tersayang

dan teman-temanku

Terima kasih banyak atas doa, dukungan dan cinta yang sudah diberikan

Untuk menyelesaikan skripsiku



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : **“Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010)”** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 19 Juli 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2012
Yang membuat pernyataan,

Andreas Suryo Adi

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Universitas Sanata Dharma:

Nama : Andreas Suryo Adi

Nomor Induk Mahasiswa : 082114001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah yang berjudul: Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Juli 2012

Yang menyatakan,



Andreas Suryo Adi

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M. Si., Akt., QIA selaku Kepala Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak dan Ibu selaku staff Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Papa dan Mama serta Adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi dalam mengerjakan skripsi.
8. Pacarku yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat temen-temen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
10. Buat temen-temen alumni SMA Sedes Sapientiae.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2012



Andreas Suryo Adi

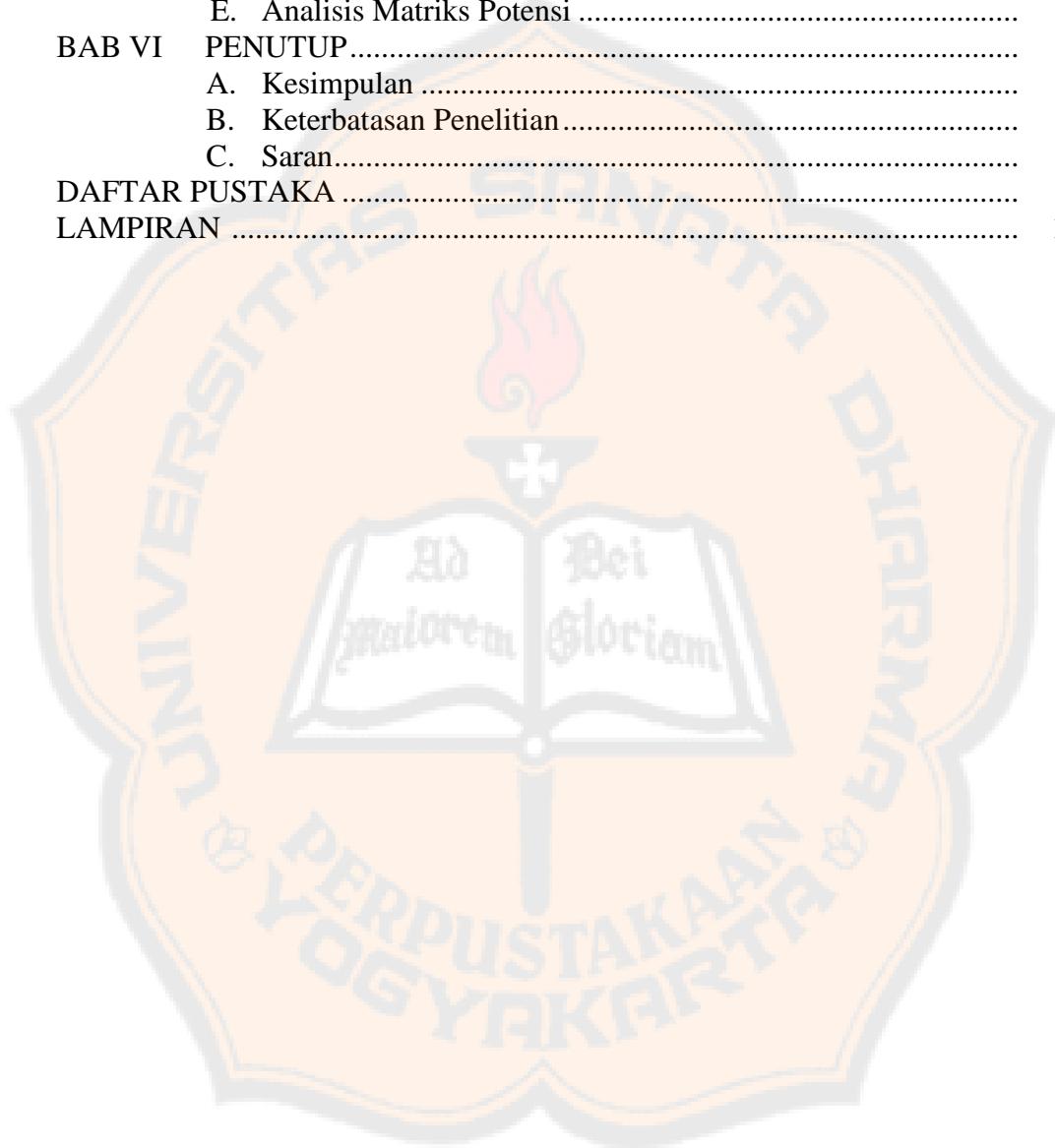


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pendapatan Daerah.....	8
B. Pajak Daerah	10
C. Retribusi Daerah.....	16
D. Analisis Efektivitas	21
E. Analisis Laju Pertumbuhan	22
F. Analisis Kontribusi	22
G. Analisis Matriks Potensi	23
H. Review Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Data yang dicari	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	34
A. Sejarah Kabupaten Sleman	34
B. Keadaan Geografis Kabupaten Sleman.....	35
C. Karakteristik Wilayah	36
D. Keadaan Penduduk	38
E. Pendidikan	39
F. Pemerintahan.....	40
G. Perekonomian Kabupaten Sleman	41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Deskripsi Data.....	42
	B. Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah	46
	C. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	60
	D. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah.....	72
	E. Analisis Matriks Potensi	85
BAB VI	PENUTUP.....	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Keterbatasan Penelitian.....	96
	C. Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Contoh Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Daerah..... 28
Tabel 2	Contoh Tabel Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah 29
Tabel 3	Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Daerah 30
Tabel 4	Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah 30
Tabel 5	Contoh Tabel Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah 31
Tabel 6	Contoh Tabel Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Retribusi Daerah..... 32
Tabel 7	Kriteria Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 32
Tabel 8	Contoh Tabel Matriks Potensi Pajak Daerah 33
Tabel 9	Contoh Tabel Matriks Potensi Retribusi Daerah..... 33
Tabel 10	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman..... 35
Tabel 11	Jumlah Penduduk WNI Kabupaten Sleman, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman 39
Tabel 12	Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin dan Instansi di Kabupaten Sleman Tahun 2010 40
Tabel 13	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2006 – 2010..... 41
Tabel 14	Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2006 42
Tabel 15	Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2007 43
Tabel 16	Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2008 44
Tabel 17	Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2009 45
Tabel 18	Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010 46
Tabel 19	Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah Tahun 2006 47
Tabel 20	Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah Tahun 2007 47
Tabel 21	Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah Tahun 2008 48
Tabel 22	Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah Tahun 2009 48
Tabel 23	Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah Tahun 2010 48
Tabel 24	Tingkat Efektivitas Pajak Daerah..... 48
Tabel 25	Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah Tahun 2006..... 50
Tabel 26	Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah Tahun 2007..... 51
Tabel 27	Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah Tahun 2008..... 52
Tabel 28	Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah Tahun 2009..... 53
Tabel 29	Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah Tahun 2010..... 53
Tabel 30	Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah 54
Tabel 31	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah Tahun 2007 61
Tabel 32	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah Tahun 2008 61
Tabel 33	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah Tahun 2009 61

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 34	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah Tahun 2010	62
Tabel 35	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2006 – 2010.....	62
Tabel 36	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah Tahun 2007.....	64
Tabel 37	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah Tahun 2008.....	65
Tabel 38	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah Tahun 2009.....	66
Tabel 39	Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah Tahun 2010.....	66
Tabel 40	Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2006 – 2010.....	67
Tabel 41	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2006.....	73
Tabel 42	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2007.....	73
Tabel 43	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2008.....	74
Tabel 44	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2009.....	74
Tabel 45	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2010.....	74
Tabel 46	Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2006 – 2010.....	75
Tabel 47	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2006.....	77
Tabel 48	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2007.....	77
Tabel 49	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2008.....	78
Tabel 50	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2009.....	78
Tabel 51	Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2010.....	79
Tabel 52	Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2006 – 2010.....	80
Tabel 53	Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah.....	87
Tabel 54	Matriks Potensi Jenis Retribusi Daerah.....	88

ABSTRAK

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010**

Andreas Suryo Adi
NIM : 082114001
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah, tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah, tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 – 2010, dan kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang dihitung dengan matriks potensi pajak dan retribusi daerah (apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang) di Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengitung rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan, rasio kontribusi dan matriks potensi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, namun ada empat jenis retribusi daerah yang tidak melebihi 100%. Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan positif, namun ada tiga jenis retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan negatif. Tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah dikategorikan tidak potensial, hanya terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan potensial dan tingkat kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah dikategorikan tidak potensial, hanya terdapat empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan potensial. Dilihat dari perhitungan matriks potensi terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan prima dan empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan prima.

ABSTRACT

**An Analysis of The Potential Local Taxes and Retributions
A Case Study at Sleman Regency Government Year 2006 – 2010**

Andreas Suryo Adi
Student Number : 082114001
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012

The research aimed to know: the level of effectiveness of each local tax and retribution, the growth rate of each local tax and retribution, the level of contribution of each local tax and retribution toward total local taxes and retributions at Sleman Regency year 2006 – 2010 and each condition of local taxes and retributions calculated with potential matrix (whether included in the prime, potential, developing or underdeveloped category) at Sleman Regency.

The type of this research was case study. The data were taken by doing interview and documentation. The techniques of the data analysis were calculating effectiveness ratio, growth ratio, contribution ratio, and potential matrix.

The result of this research showed that the effectiveness level of each local tax and retribution revenue was more than 100%, but there were still four local retributions which was under 100%. The growth rate of each local tax and retribution was positive but there were three types of local retributions that were negative. The level of contributions in each tax toward local taxes were not potential but there were two kinds of local taxes that were potential, and for the local retributions, there were four local retributions which were in potential category. Excluding those four, the retributions were not potential. In potential matrix, there are two types of local taxes and four types of local retribution in prime category.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Pajak ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, baik dalam hal mencari pemasukan maupun alokasi pengeluarannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.

Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus dapat diminimalkan, pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri dan dapat memperlancar kegiatan dan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang harus memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari 4 sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung sehingga dapat dipaksakan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penelitian ini akan menggali aspek-aspek pendapatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman, terlebih yang berkaitan dengan komponen yang ada di dalam Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Sleman sehingga dapat memperlancar kegiatan dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman harus dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010?
2. Bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang diukur dengan tingkat pertumbuhan di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010?
3. Bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang diukur dengan tingkat kontribusinya terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010?
4. Bagaimana kondisimasing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang dihitung dengan matriks potensi pajak/retribusi daerah?(apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang)di Kabupaten Sleman?

C. Batasan Masalah

1. Peneliti hanya meneliti retribusi daerah yang konsisten ada pada setiap tahunnya. Terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak peneliti sertakan dalam penelitian ini seperti retribusi ijin pramuwisata, retribusi pasar hewan gamping, retribusi cetak foto, retribusi air limbah, dan retribusi pelayanan pemakaman karena retribusi tersebut tidak konsisten

ada pada setiap tahunnya, jadi peneliti hanya menyertakan retribusi yang konsisten ada pada setiap tahunnya.

2. Pada tahun 2006 dan 2007, Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinkes dan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dijadikan satu nama menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan karena di tahun 2008-2010 retribusi tersebut menjadi satu yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010.
4. Untuk mengetahui kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang dihitung dengan matriks potensi pajak/retribusi daerah (apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang) di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi di perpustakaan serta dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan saya terhadap pajak dan retribusi daerah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah pengertian tentang pendapatan daerah dan sumber pendapatan daerah, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, analisis analisis efektivitas, analisis pertumbuhan, analisis kontribusi, dan analisis matriks potensi.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV **Gambaran Umum Pemerintahan**

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah gambaran umum Kabupaten Sleman seperti sejarah singkat, keadaan geografis, karakteristik wilayah, keadaan penduduk, sosial, pemerintah, perekonomian Kabupaten Sleman.

Bab V **Analisis Data dan Pembahasan**

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang terdiri dari analisis data dan pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.

Bab VI **Penutup**

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

2. Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari :

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum (DAU)
- 3) Dana alokasi khusus (DAK)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup :

- 1) Hibah/bantuan dari pemerintah

- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- 4) Dana penyesuaian
- 5) Bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2010: 7), pajak daerah adalah ”pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Berdasarkan definisi pajak, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
- d. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- e. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Bambang (2003: 3-4), pajak daerah menurut wilayah pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

3. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat

menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel. Tarif pajak hotel adalah sepuluh persen.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran dan tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha restoran. Tarif pajak restoran adalah sepuluh persen.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan/atau keramaian penggunaan fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan adalah tiga puluh lima persen.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pesanan reklame. Tarif pajak reklame adalah dua puluh lima persen.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Objek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan adalah sepuluh persen.

f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Subjek pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Tarif pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah dua puluh persen.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang dipungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Tarif pajak parkir adalah dua puluh persen.

C. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2010: 5), retribusi adalah “pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah, yaitu :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terdiri dari tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu

- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi jasa umum atau perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus

- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi perijinan Tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif

dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut :

- 1) Retribusi Izin mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

D. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002: 4). Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan. Jika organisasi tersebut sudah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif. Analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui apakah pajak atau retribusi daerah sudah mencapai target atau tidak.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Anggaran pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Anggaran retribusi daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

Realisasi : realisasi masing-masing pajak atau retribusi daerah

Anggaran : anggaran masing-masing pajak atau retribusi daerah

E. Analisis Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif setiap tahunnya.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah digunakan rumus (Halim, 2004: 163) :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Laju Pertumbuhan jenis Pajak dan Retribusi Daerah per tahun

X_t : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya

F. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan jenis pajak atau retribusi daerah terhadap total pajak atau retribusi daerah.

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak atau retribusi daerah digunakan rumus (Halim, 2004: 163) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Y : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

G. Analisis Matriks Potensi

Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang.

Kriteria pajak dan retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kondisi, yaitu (Haning dan Radianto, 2005):

- a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial.
- b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial.
- c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial.
- d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

H. Review Penelitian Terdahulu

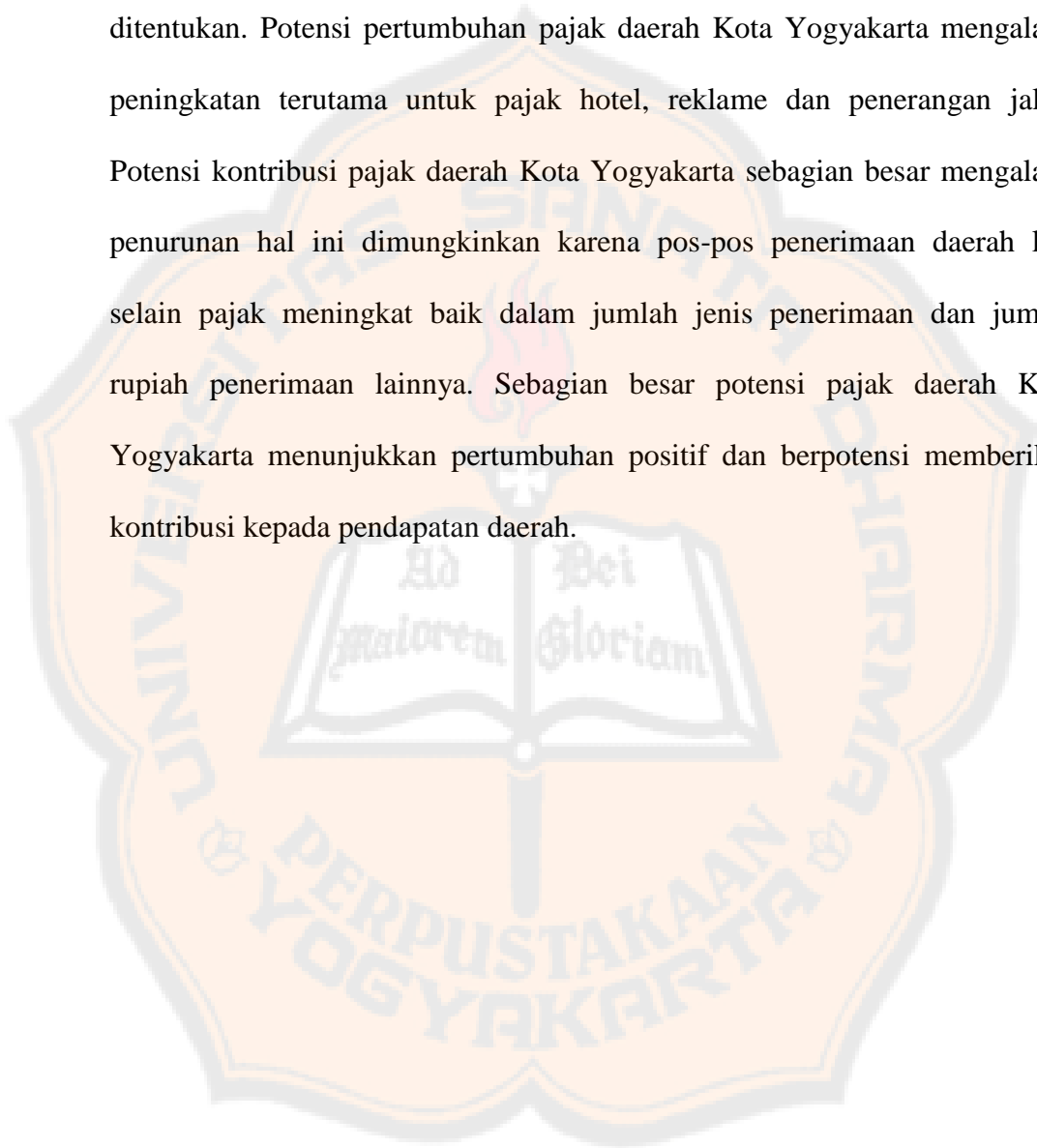
Mulyanto pada tahun 2002 melakukan penelitian tentang potensi pajak dan retribusi daerah di daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosuka Wonosraten) yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan *collection ratio*, *growth model*, *proportional model*, dan *matrix model* penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis potensi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak macam pajak dan retribusi daerah yang diterapkan di kawasan Subosuka Wonosraten. Beberapa pajak yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah yaitu pajak hotel dan restoran, pajak pertunjukan/hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan umum, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah, retribusi sampah, retribusi pelayanan sampah/kebersihan, retribusi parkir, retribusi terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Riyardi dkk pada tahun 2002 melakukan penelitian di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini berhasil menemukan potensi ekonomi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu jumlah penduduk dan rumah tangga, keberadaan daerah tumbuh cepat, perilaku organisasional dan ekonomi instansi pemungut pajak dan retribusi daerah. penelitian ini menggunakan enam pajak daerah dan sebelas retribusi daerah. pajak dan retribusi daerah tersebut dianalisis dengan menggunakan lima tolok ukur yaitu *yield*, *ability to implement*, *equity*, *economic efficiency*, dan *suitability as a local source*.

Dedy Haning dan Wirawan Endro Dwi Radianto pada tahun 2005 melakukan penelitian tentang analisis potensi pajak daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pajak daerah melalui variabel-variabel tingkat efisiensi, tingkat pertumbuhan, tingkat kontribusi, dan matriks potensi pajak daerah di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan enam jenis pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi efisiensi pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang terlihat dari tidak tercapainya target yang ditentukan. Potensi pertumbuhan pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan terutama untuk pajak hotel, reklame dan penerangan jalan. Potensi kontribusi pajak daerah Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami penurunan hal ini dimungkinkan karena pos-pos penerimaan daerah lain selain pajak meningkat baik dalam jumlah jenis penerimaan dan jumlah rupiah penerimaan lainnya. Sebagian besar potensi pajak daerah Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif dan berpotensi memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dan hasil penelitian serta kesimpulan hanya berlaku pada objek tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada 21 Februari – 21 Mei 2012

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian tersebut. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dan data anggaran/target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

D. Data yang Dicari

Data yang dicari atau data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman
2. Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2010
3. Data anggaran/target penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2010

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

1. Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak dan retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu dan data anggaran/target masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Anggaran pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Anggaran retribusi daerah}} \times 100\%$$

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke dalam tabel.

Tabel 1. Contoh Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Rata-rata							

Tabel 2. Contoh Tabel Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Rata-rata							

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan

daerah yang makin baik. (Halim, 2004:135) dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. (Haning dan Radianto, 2005: 6)

2. Laju Pertumbuhan

Untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing pajak dan retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Laju Pertumbuhan jenis Pajak dan Retribusi Daerah per tahun

X_t : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke dalam tabel.

Tabel 3. Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata

Tabel 4. Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata

Jika dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan maka dapat diartikan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya positif dan dikatakan potensial. Dan jika dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan maka dapat diartikan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya negatif dan dikatakan tidak potensial.

3. Kontribusi

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing pajak dan retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah tahun tertentu. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus :

$$Kontribusi = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Y : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam menghitung kontribusi jenis pajak dan retribusi daerah peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005) dengan cara mengambil rata-rata dari tujuh pajak daerah dan mengambil rata-rata dari dua puluh satu retribusi daerah sebagai tolok ukur.

Apabila jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan potensial. Apabila jenis retribusi daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis retribusi daerah lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan potensial.

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke dalam tabel.

Tabel 5. Contoh Tabel Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Rata-rata						

Tabel 6. Contoh Tabel Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Rata-rata						

4. Matriks Potensi

Untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005).

Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus :

Tabel 7. Kriteria Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Kontribusi	$\frac{X}{Y} = \textit{potensial}$	$\frac{X}{Y} = \textit{tidak potensial}$
Pertumbuhan		
$Gx = \textit{positif}$	Prima	Berkembang
$Gx = \textit{negatif}$	Potensial	Terbelakang

Sumber: Haning dan Radianto, 2005

Keterangan:

Gx : Laju Pertumbuhan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

X : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Y : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke dalam tabel.

Tabel 8. Contoh Tabel Matriks Potensi Pajak Daerah

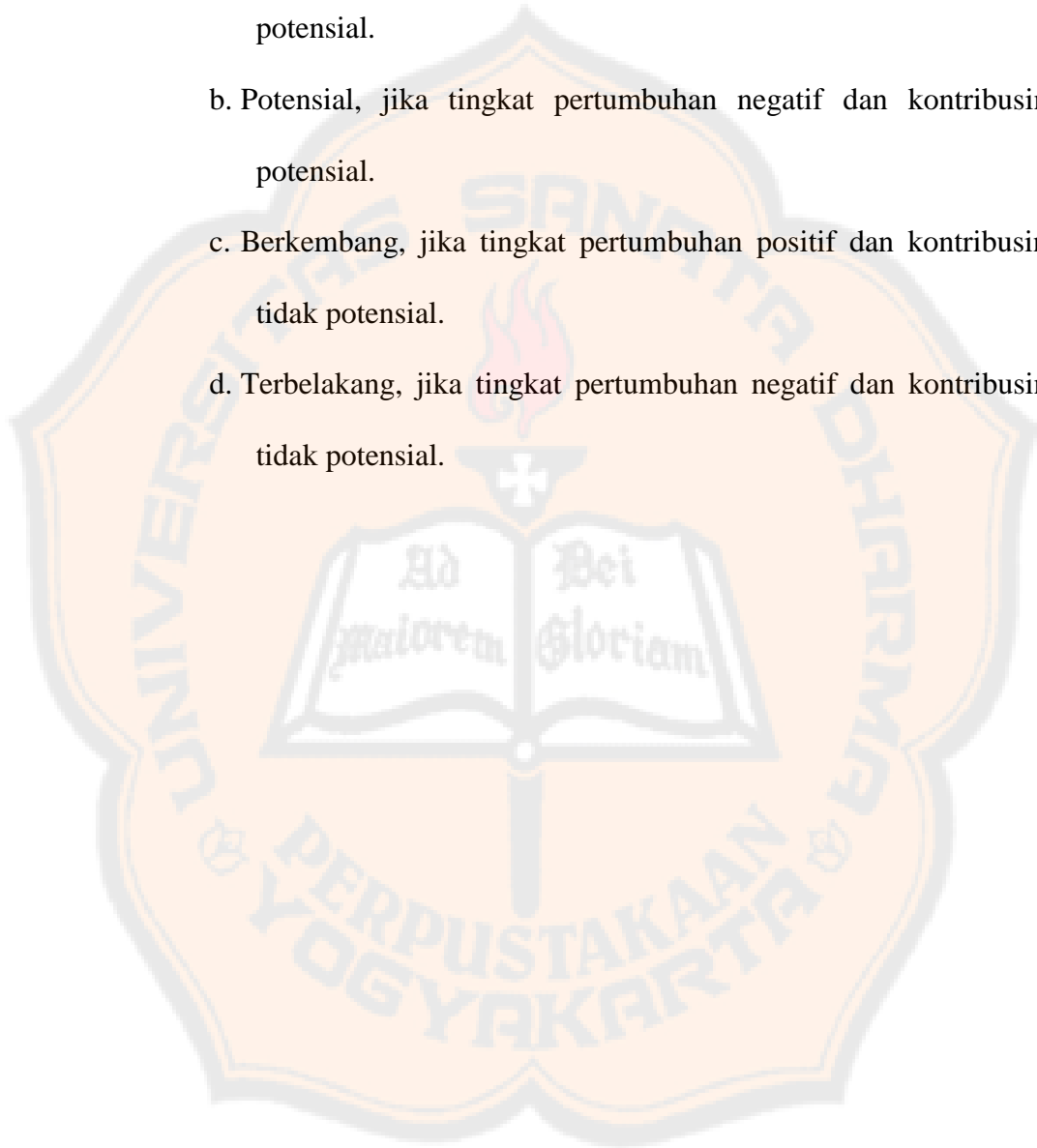
No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbuhan (Gx)	Koefisien Kontribusi (X/Y)	Kriteria

Tabel 9. Contoh Tabel Matriks Potensi Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi Daerah	Koefisien Pertumbuhan (Gx)	Koefisien Kontribusi (X/Y)	Kriteria

Kriteria pajak dan retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kondisi, yaitu :

- a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial.
- b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial.
- c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial.
- d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kabupaten Sleman

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Rijksblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Berdasarkan Perda no.12 Tahun 1998, pada tanggal 15 Mei tahun 1916 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Dalam perhitungan tahun masehi, hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan Surya Sengkala "Rasa Manunggal Hanggatra Negara" yang memiliki sifat bilangan Rasa= 6, Manunggal=1, Hanggatra=9, Negara=1, sehingga terbaca tahun 1916. Sedangkan perhitungan tahun jawa diperoleh Candra Sengkala "Anggana Catur Salira Tunggal" yang memiliki arti Anggana=6, Catur=4, Salira=8, Tunggal=1. Dengan demikian dari Candra Sengkala tersebut terbaca tahun 1846.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

B. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel 10. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Brebah	4	58	2.299

Tabel 10. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman (Lanjutan)

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

C. Karakteristik Wilayah

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu :
 - a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;
 - b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih
 - c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa
 - d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia

cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

2. Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, dan Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.
3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
 - a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
 - b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan

masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

- c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

D. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.093.110 jiwa yang terdiri dari 547.885 jiwa laki-laki dan 545.225 jiwa perempuan.

Kecamatan Depok memiliki penduduk terbesar diantara kecamatan lain yaitu sebanyak 181.490 jiwa atau 16,60% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Sleman. Setelah itu diikuti Kecamatan Ngaglik, Melati, dan Gamping dengan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 101.887 jiwa, 101.031 jiwa, dan 96.820 jiwa.

Kecamatan Cangkringan memiliki penduduk paling sedikit diantara kecamatan lain yaitu sebanyak 28.201 jiwa atau 2,58% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Sleman. Setelah itu diikuti Kecamatan Minggir, Moyudan dan Turi dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 29.263 jiwa, 30.883 jiwa, dan 33.101 jiwa.

Tabel 11. Jumlah Penduduk WNI Kabupaten Sleman, menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Gamping	48.605	48.215	96.820
2.	Godean	32.868	33.022	65.890
3.	Moyudan	15.103	15.780	30.883
4.	Minggir	14.264	14.999	29.263
5.	Seyegan	22.291	22.758	45.049
6.	Mlati	51.628	49.403	101.031
7.	Depok	93.930	87.560	181.490
8.	Berbah	25.108	25.679	50.787
9.	Prambanan	23.040	23.817	46.857
10.	Kalasan	37.801	38.357	76.158
11.	Ngemplak	29.312	29.638	58.950
12.	Ngaglik	51.157	50.730	101.887
13.	Sleman	30.915	31.847	62.762
14.	Tempel	24.431	24.881	49.312
15.	Turi	16.422	16.679	33.101
16.	Pakem	17.124	17.545	34.669
17.	Cangkringan	13.886	14.315	28.201
Jumlah Penduduk		547.885	545.225	1.093.110

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

E. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Kualitas pendidikan yang bagus menjadi tolok ukur kemauan suatu bangsa. Pada jenjang SD, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 519 sekolah yang terdiri dari 381 SD negeri dan 138 SD swasta. Pada SD negeri terdapat guru sebanyak 4.520 orang dan siswa sebanyak 65.702 orang dan pada SD swasta terdapat guru sebanyak 1.850 orang dan siswa sebanyak 23.633 orang.

Pada jenjang SMP, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 121 sekolah yang terdiri dari 64 SMP negeri dan 57 SMP swasta. Pada SMP negeri terdapat guru sebanyak 2.076 orang dan siswa sebanyak 28.236 orang dan pada SMP swasta terdapat guru sebanyak 1.126 orang dan siswa sebanyak 11.823 orang.

Pada jenjang SMA, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 57 sekolah yang terdiri dari 22 SMA negeri dan 35 SMA swasta. Pada SMA negeri terdapat guru sebanyak 929 orang dan siswa sebanyak 9.671 orang dan pada SMA swasta terdapat guru sebanyak 811 orang dan siswa sebanyak 4.596 orang.

Pada jenjang SMK, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 53 sekolah yang terdiri dari 8 SMK negeri dan 45 SMK swasta. Pada SMK negeri terdapat guru sebanyak 619 orang dan siswa sebanyak 6.840 orang dan pada SMK swasta terdapat guru sebanyak 1.325 orang dan siswa sebanyak 12.150 orang.

F. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Sleman dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jumlah pegawai di lingkungan Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebanyak 13.415 orang yang terdiri dari 6.141 laki-laki dan 7.274 perempuan. Latar belakang pendidikan pegawai terdiri dari SD sebanyak 166 orang, SMP sebanyak 339 orang, SMA sebanyak 3535 orang, Diploma I – Diploma III sebanyak 3.632 orang, Sarmud sebanyak 342 orang, Diploma IV – S2 sebanyak 5.401 orang.

Tabel 12. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin dan Instansi di Kabupaten Sleman Tahun 2010

Jenis Kelamin		L	P168	Jumlah
Jenjang Pendidikan	SD	148	18	166
	SMP	293	46	339
	SMA	1.755	1.780	3.535
	D.I	67	168	235
	D.II	798	1.632	2430
	D.III	371	596	967
	Sarmud	175	167	342

Tabel 12. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin dan Instansi di Kabupaten Sleman Tahun 2010 (Lanjutan)

Jenis Kelamin	L	P168	Jumlah
D.IV	31	10	41
S-1	2.283	2.712	4.995
S-2	220	145	365
Jenis Kelamin	L/P	6.141	7.274
			13.415

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

G. Perekonomian Kabupaten Sleman

Perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2006-2010 didominasi oleh empat sektor. Empat sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, jasa-jasa, pertanian, dan pengolahan. Pada tahun tersebut perekonomian Kabupaten Sleman relatif baik dan stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar 11 persen. Sedangkan lima sektor lainnya hanya menyumbangkan sedikit seperti sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel 13. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2006-2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	17,45%	16,63%	16,91%	16,47%	15,72%
2. Pertambangan dan penggalian	0,36%	0,59%	0,52%	0,47%	0,52%
3. Industri pengolahan	16,45%	16,04%	15,49%	15,11%	14,91%
4. Listrik, gas, dan air bersih	0,86%	0,90%	0,90%	0,92%	0,92%
5. Bangunan	10,45%	10,83%	11,01%	11,22%	11,45%
6. Perdagangan, hotel dan restoran	21,21%	21,69%	21,87%	22,29%	22,54%
7. Pengangkutan dan komunikasi	5,66%	5,80%	5,81%	5,92%	6,04%
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	10,16%	10,21%	10,25%	10,35%	10,50%
9. Jasa-jasa	17,44%	17,31%	17,24%	17,23%	17,41%
Produk Domestik Regional Bruto	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yaitu dengan mengetahui efektivitas pajak dan retribusi daerah, laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah, serta kontribusi pajak dan retribusi daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebesar data realisasi dan anggaran penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai realisasi dan anggaran pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2006

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	9.000.000.000	9.761.983.321,60
2	Pajak Restoran	2.900.000.000	3.443.232.572,05
3	Pajak Hiburan	900.000.000	959.443.926,28
4	Pajak Reklame	3.800.000.000	4.454.870.681,39
5	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000	18.652.038.103,00
6	Pajak PPBGGC	250.000.000	304.833.900,00
7	Pajak Parkir	400.000.000	402.910.870,00
	Jumlah	32.750.000.000	37.979.313.374,32

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	19.196.550.000	19.819.025.001
2	Ret. Pelayanan Persampahan	725.000.000	763.810.650
3	Ret. Cetak KTP	650.000.000	768.237.500
4	Ret. Cetak akte capil	300.000.000	278.304.600
5	Ret. Parkir Jalan Umum	200.000.000	207.423.000
6	Ret. Pasar	2.600.000.000	2.433.749.100
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	900.000.000	879.959.000

Tabel 14. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2006 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
8	Ret. JasaPemakaian Kekayaan Daerah	256.400.000	246.905.300
9	Ret. JasaUsaha Terminal	218.892.000	189.825.000
10	Ret. JasaUsaha Rumah Potong Hewan	75.000.000	59.038.600
11	Ret. JasaTempat Rekreasi OR	410.500.000	422.705.163
12	Ret. Penjualan ProdukDaerah	253.250.000	195.724.410
13	Ret.IjinMendirikan Bangunan	2.769.000.000	2.630.792.764,03
14	Ret.IjinGangguan	600.000.000	591.125.000
15	Ret.IjinTrayek	8.300.000	7.610.000
16	Ret.IjinPeruntukan Penggunaan Tanah	3.100.000.000	3.602.494.978,80
17	IUJK	23.000.000	42.250.000
18	IjinUsaha Perdagangan	70.000.000	92.515.000
19	Tanda Daftar Industri	9.100.000	9.550.000
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	59.996.000
21	Ret. Tower	981.000.000	1.559.095.650
	Jumlah	33.405.992.000	34.863.136.716,83

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 15. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	10.000.000.000	11.423.620.418,85
2	Pajak Restoran	4.500.000.000	5.320.503.571,82
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000	2.035.377.677,33
4	Pajak Reklame	4.500.000.000	4.749.917.481,91
5	Pajak Penerangan Jalan	20.500.000.000	25.705.707.427
6	Pajak PPBGGC	600.000.000	633.093.975
7	Pajak Parkir	400.000.000	419.445.180
	Jumlah	42.000.000.000	50.287.665.731,91

Keterangan :

Pajak PPBGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	24.046.000.000	24.606.259.953
2	Ret. Pelayanan Persampahan	775.000.000	666.455.200
3	Ret. Cetak KTP	822.400.000	918.738.000
4	Ret. Cetak akte capil	258.570.000	266.304.100
5	Ret. Parkir Jalan Umum	275.000.000	446.850.500
6	Ret. Pasar	2.300.000.000	2.745.303.900
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	860.000.000	892.951.500
8	Ret. JasaPemakaian Kekayaan Daerah	275.938.600	357.536.723
9	Ret. JasaUsaha Terminal	202.086.000	193.576.950
10	Ret. JasaUsaha Rumah Potong Hewan	55.000.000	52.072.407

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi OR	524.302.560	608.829.103
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	212.500.000	181.554.500
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.261.500.000	1.263.606.708
14	Ret. Ijin Gangguan	575.000.000	664.325.000
15	Ret. Ijin Trayek	7.610.000	7.930.000
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.250.000.000	3.296.450.564
17	IUJK	13.000.000	23.600.000
18	Ijin Usaha Perdagangan	77.000.000	110.705.000
19	Tanda Daftar Industri	10.600.000	13.525.000
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	59.976.000
21	Ret. Tower	2.000.000.000	1.878.125.000
	Jumlah	38.861.507.160	39.254.676.108

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 16. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2008

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	11.000.000.000	14.522.397.204,16
2	Pajak Restoran	5.100.000.000	6.675.522.008,57
3	Pajak Hiburan	2.300.000.000	3.553.667.031,10
4	Pajak Reklame	5.621.622.443	8.147.022.563,37
5	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000	26.921.123.335,00
6	Pajak PPBGGC	650.000.000	551.072.688,50
7	Pajak Parkir	500.000.000	650.094.300,00
	Jumlah	49.171.622.443	61.020.899.130,70

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	28.876.750.000	29.866.288.254
2	Ret. Pelayanan Persampahan	635.500.000	667.660.500
3	Ret. Cetak KTP	879.900.000	1.047.439.000
4	Ret. Cetak akte capil	274.675.000	305.173.700
5	Ret. Parkir Jalan Umum	400.000.000	331.546.000
6	Ret. Pasar	2.700.000.000	2.850.023.050
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	900.500.000	915.822.000
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	391.339.600	471.456.800
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	231.606.000	296.454.500
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.000.000	55.014.750
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	494.479.280	643.775.190
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	233.500.000	183.352.050
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.611.500.000	3.955.793.076
14	Ret. Ijin Gangguan	600.000.000	694.485.000
15	Ret. Ijin Trayek	7.530.000	8.160.000
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.350.000.000	6.201.260.390
17	IUJK	13.000.000	18.662.500
18	Ijin Usaha Perdagangan	84.840.000	110.280.000
19	Tanda Daftar Industri	8.800.000	11.375.000

Tabel 16. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2008 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	47.504.000
21	Ret. Tower	2.000.000.000	3.251.250.000
	Jumlah	44.808.919.880	51.932.775.760

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 17. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2009

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	12.500.000.000	18.189.624.204,48
2	Pajak Restoran	6.000.000.000	7.628.940.657,53
3	Pajak Hiburan	2.600.000.000	3.637.358.441,16
4	Pajak Reklame	6.800.000.000	9.010.860.114,49
5	Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000	31.190.111.489,00
6	Pajak PPBGGC	650.000.000	662.441.550,00
7	Pajak Parkir	600.000.000	725.394.650,00
	Jumlah	56.350.000.000	71.044.731.106,66

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	30.759.764.856	28.208.534.183,80
2	Ret. Pelayanan Persampahan	700.000.000	817.194.100
3	Ret. Cetak KTP	972.550.000	871.455.500
4	Ret. Cetak akte capil	375.520.000	438.840.700
5	Ret. Parkir Jalan Umum	330.090.000	338.838.500
6	Ret. Pasar	2.700.000.000	2.988.086.050
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	850.000.000	876.145.000
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	556.890.200	889.509.800
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	234.750.000	269.590.300
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.000.000	43.656.000
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.203.962.974	2.120.312.614
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	171.115.650	179.575.800
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.900.000.000	5.193.581.534,65
14	Ret. Ijin Gangguan	650.000.000	846.885.000
15	Ret. Ijin Trayek	7.660.000	9.275.000
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	4.750.000.000	7.218.400.373,45
17	IUJK	13.000.000	49.900.000
18	Ijin Usaha Perdagangan	87.190.000	119.345.000
19	Tanda Daftar Industri	9.100.000	12.625.000
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	43.344.000
21	Ret. Tower	2.000.000.000	3.016.437.500
	Jumlah	49.386.593.680	54.551.531.955,90

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 18. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	21.326.096.600	22.473.840.945,14
2	Pajak Restoran	8.668.000.000	10.195.038.726,88
3	Pajak Hiburan	3.500.000.000	3.786.482.376,85
4	Pajak Reklame	8.600.000.000	9.066.604.451,65
5	Pajak Penerangan Jalan	32.500.000.000	33.619.390.346,00
6	Pajak PPBGGC	650.000.000	699.977.655,00
7	Pajak Parkir	725.000.000	770.208.454,00
	Jumlah	75.969.096.600	80.611.542.955,52

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	34.475.000.000	32.679.740.322
2	Ret. Pelayanan Persampahan	800.000.000	905.595.300
3	Ret. Cetak KTP	1.906.552.000	1.518.770.500
4	Ret. Cetak Akte Capil	482.100.000	382.303.000
5	Ret. Parkir Jalan Umum	330.090.000	339.216.000
6	Ret. Pasar	3.212.125.200	3.272.564.550
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	850.000.000	896.407.000
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	925.215.200	1.232.148.500
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	231.450.000	253.657.550
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.605.061.280	2.057.407.437
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	181.128.000	194.295.750
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	3.400.000.000	4.846.180.214
14	Ret. Ijin Gangguan	700.000.000	812.715.000
15	Ret. Ijin Trayek	7.500.000	9.635.000
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	5.499.000.000	7.601.982.568
17	IUJK	13.000.000	23.900.000
18	Ijin Usaha Perdagangan	88.190.000	140.830.000
19	Tanda Daftar Industri	9.100.000	11.150.000
20	Ret. Pelatihan BLK	36.000.000	26.030.900
21	Ret. Tower	3.000.000.000	1.681.250.000
	jumlah	58.782.501.680	58.919.339.091

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

B. Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak dan retribusi daerah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen, semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135) dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan (Haning dan Radianto, 2005:

6)

Untuk mengetahui tingkat efektivitas digunakan rumus:

1. Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Anggaran pajak daerah}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2006

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{9.761.983.321,60}{9.000.000.000} \times 100\% \\ &= 108,47\% \end{aligned}$$

Tabel 19. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2006

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Pajak Hotel	9.000.000.000	9.761.983.321,60	108,47%
2	Pajak Restoran	2.900.000.000	3.443.232.572,05	118,73%
3	Pajak Hiburan	900.000.000	959.443.926,28	106,60%
4	Pajak Reklame	3.800.000.000	4.454.870.681,39	117,23%
5	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000	18.652.038.103,00	120,34%
6	Pajak PPBGGC	250.000.000	304.833.900,00	121,93%
7	Pajak Parkir	400.000.000	402.910.870,00	100,73%
	Jumlah	32.750.000.000	37.979.313.374,32	115,97%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 20. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Pajak Hotel	10.000.000.000	11.423.620.418,85	114,24%
2	Pajak Restoran	4.500.000.000	5.320.503.571,82	118,23%
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000	2.035.377.677,33	135,69%
4	Pajak Reklame	4.500.000.000	4.749.917.481,91	105,55%
5	Pajak Penerangan Jalan	20.500.000.000	25.705.707.427	125,39%
6	Pajak PPBGGC	600.000.000	633.093.975	105,52%
7	Pajak Parkir	400.000.000	419.445.180	104,86%
	Jumlah	42.000.000.000	50.287.665.732	119,73%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 21. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2008

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Pajak Hotel	11.000.000.000	14.522.397.204,16	132,02%
2	Pajak Restoran	5.100.000.000	6.675.522.008,57	130,89%
3	Pajak Hiburan	2.300.000.000	3.553.667.031,10	154,51%
4	Pajak Reklame	5.621.622.443	8.147.022.563,37	144,92%
5	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000	26.921.123.335,00	112,17%
6	Pajak PPBGGC	650.000.000	551.072.688,50	84,78%
7	Pajak Parkir	500.000.000	650.094.300,00	130,02%
	Jumlah	49.171.622.443	61.020.899.131	124,10%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 22. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2009

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Pajak Hotel	12.500.000.000	18.189.624.204,48	145,52%
2	Pajak Restoran	6.000.000.000	7.628.940.657,53	127,15%
3	Pajak Hiburan	2.600.000.000	3.637.358.441,16	139,90%
4	Pajak Reklame	6.800.000.000	9.010.860.114,49	132,51%
5	Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000	31.190.111.489,00	114,67%
6	Pajak PPBGGC	650.000.000	662.441.550,00	101,91%
7	Pajak Parkir	600.000.000	725.394.650,00	120,90%
	Jumlah	56.350.000.000	71.044.731.107	126,08%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 23. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Pajak Hotel	21.326.096.600	22.473.840.945,14	105,38%
2	Pajak Restoran	8.668.000.000	10.195.038.726,88	117,62%
3	Pajak Hiburan	3.500.000.000	3.786.482.376,85	108,19%
4	Pajak Reklame	8.600.000.000	9.066.604.451,65	105,43%
5	Pajak Penerangan Jalan	32.500.000.000	33.619.390.346,00	103,44%
6	Pajak PPBGGC	650.000.000	699.977.655,00	107,69%
7	Pajak Parkir	725.000.000	770.208.454,00	106,24%
	Jumlah	75.969.096.600	80.611.542.955,52	106,11%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 24. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun \ Jenis Pajak	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Pajak Hotel	108,47%	114,24%	132,02%	145,52%	105,38%	121,13%	Efektif
Pajak Restoran	118,73%	118,23%	130,89%	127,15%	117,62%	122,52%	Efektif
Pajak Hiburan	106,60%	135,69%	154,51%	139,90%	108,19%	128,98%	Efektif
Pajak Reklame	117,23%	105,55%	144,92%	132,51%	105,43%	121,13%	Efektif
Pajak Penerangan Jalan							Efektif
Pajak Penerangan Jalan	120,34%	125,39%	112,17%	114,67%	103,44%	115,20%	
Pajak PPBGGC	121,93%	105,52%	84,78%	101,91%	107,69%	104,37%	Efektif
Pajak Parkir	100,73%	104,86%	130,02%	120,90%	106,24%	112,55%	Efektif
	Rata-rata					117,98%	

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 121,13%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 122,52%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 128,98%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 121,13%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- e. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar

115,20%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

- f. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 104,37%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Namun di tahun 2008 efektivitasnya kurang dari 100% yaitu sebesar 84,78%, hal ini disebabkan karena material sangat minim di tahun ini.
- g. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 112,55%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

2. Retribusi Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Anggaran retribusi daerah}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan efektivitas retribusi pelayanan kesehatan tahun 2006

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{19.819.025.001}{19.196.550.000} \times 100\% \\ &= 103,24\% \end{aligned}$$

Tabel 25. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2006

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	19.196.550.000	19.819.025.001	103,24%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	725.000.000	763.810.650	105,35%
3	Ret. Cetak KTP	650.000.000	768.237.500	118,19%
4	Ret. Cetak akte capil	300.000.000	278.304.600	92,77%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	200.000.000	207.423.000	103,71%

Tabel 25. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2006 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
6	Ret. Pasar	2.600.000.000	2.433.749.100	93,61%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	900.000.000	879.959.000	97,77%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	256.400.000	246.905.300	96,30%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	218.892.000	189.825.000	86,72%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	75.000.000	59.038.600	78,72%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	410.500.000	422.705.163	102,97%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	253.250.000	195.724.410	77,29%
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.769.000.000	2.630.792.764,03	95,01%
14	Ret. Ijin Gangguan	600.000.000	591.125.000	98,52%
15	Ret. Ijin Trayek	8.300.000	7.610.000	91,69%
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.100.000.000	3.602.494.978,80	116,21%
17	IUJK	23.000.000	45.250.000	196,74%
18	Ijin Usaha Perdagangan	70.000.000	92.515.000	132,16%
19	Tanda Daftar Industri	9.100.000	9.550.000	104,95%
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	59.996.000	99,99%
21	Ret. Tower	981.000.000	1.559.095.650	158,93%
	Jumlah	33.405.992.000	34.863.136.717	104,36%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 26. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2007

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	24.046.000.000	24.606.259.953	102,33%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	775.000.000	666.455.200	85,99%
3	Ret. Cetak KTP	822.400.000	918.738.000	111,71%
4	Ret. Cetak akte capil	258.570.000	266.304.100	102,99%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	275.000.000	446.850.500	162,49%
6	Ret. Pasar	2.300.000.000	2.745.303.900	119,36%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	860.000.000	892.951.500	103,83%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	275.938.600	357.536.723	129,57%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	202.086.000	193.576.950	95,79%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.000.000	52.072.407	94,68%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	524.302.560	608.829.103	116,12%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	212.500.000	181.554.500	85,44%
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.261.500.000	1.263.606.708	55,87%
14	Ret. Ijin Gangguan	575.000.000	664.325.000	115,53%
15	Ret. Ijin Trayek	7.610.000	7.930.000	104,20%

Tabel 26. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2007 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.250.000.000	3.296.450.564	101,43%
17	IUJK	13.000.000	23.600.000	181,54%
18	Ijin Usaha Perdagangan	77.000.000	110.705.000	143,77%
19	Tanda Daftar Industri	10.600.000	13.525.000	127,59%
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	59.976.000	99,96%
21	Ret. Tower	2.000.000.000	1.878.125.000	93,91%
	Jumlah	38.861.507.160	39.254.676.108	101,01%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 27. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2008

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	28.876.750.000	29.866.288.254	103,43%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	635.500.000	667.660.500	105,06%
3	Ret. Cetak KTP	879.900.000	1.047.439.000	119,04%
4	Ret. Cetak akte capil	274.675.000	305.173.700	111,10%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	400.000.000	331.546.000	82,89%
6	Ret. Pasar	2.700.000.000	2.850.023.050	105,56%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	900.500.000	915.822.000	101,70%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	391.339.600	471.456.800	120,47%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	231.606.000	296.454.500	128,00%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.000.000	55.014.750	100,03%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	494.479.280	643.775.190	130,19%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	233.500.000	183.352.050	78,52%
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.611.500.000	3.955.793.076	151,48%
14	Ret. Ijin Gangguan	600.000.000	694.485.000	115,75%
15	Ret. Ijin Trayek	7.530.000	8.160.000	108,37%
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.350.000.000	6.201.260.390	185,11%
17	IUJK	13.000.000	18.662.500	143,56%
18	Ijin Usaha Perdagangan	84.840.000	110.280.000	129,99%
19	Tanda Daftar Industri	8.800.000	11.375.000	129,26%
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	47.504.000	79,17%
21	Ret. Tower	2.000.000.000	3.251.250.000	162,56%
	Jumlah	44.808.919.880	51.932.775.760	115,90%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 28. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2009

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	30.759.764.856	28.208.534.183,80	91,71%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	700.000.000	817.194.100	116,74%
3	Ret. Cetak KTP	972.550.000	871.455.500	89,61%
4	Ret. Cetak Akte Capil	375.520.000	438.840.700	116,86%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	330.090.000	338.838.500	102,65%
6	Ret. Pasar	2.700.000.000	2.988.086.050	110,67%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	850.000.000	876.145.000	103,08%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	556.890.200	889.509.800	159,73%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	234.750.000	269.590.300	114,84%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.000.000	43.656.000	79,37%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.203.962.974	2.120.312.614	176,11%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	171.115.650	179.575.800	104,94%
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.900.000.000	5.193.581.534,65	179,09%
14	Ret. Ijin Gangguan	650.000.000	846.885.000	130,29%
15	Ret. Ijin Trayek	7.660.000	9.275.000	121,08%
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	4.750.000.000	7.218.400.373,45	151,97%
17	IUJK	13.000.000	49.900.000	383,85%
18	Ijin Usaha Perdagangan	87.190.000	119.345.000	136,88%
19	Tanda Daftar Industri	9.100.000	12.625.000	138,74%
20	Ret. Pelatihan BLK	60.000.000	43.344.000	72,24%
21	Ret. Tower	2.000.000.000	3.016.437.500	150,82%
	Jumlah	49.386.593.680	54.551.631.956,90	110,46%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 29. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2010

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	34.475.000	32.679.740.322	94,79%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	800.000.000	905.595.300	113,20%
3	Ret. Cetak KTP	1.906.552.000	1.518.770.500	79,66%
4	Ret. Cetak Akte Capil	482.100.000	382.303.000	79,30%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	330.090.000	339.216.000	102,76%
6	Ret. Pasar	3.212.125.200	3.272.564.550	101,88%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	850.000.000	896.407.000	105,46%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	925.215.200	1.232.148.500	133,17%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	231.450.000	253.657.550	109,59%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	30.990.000	33.559.500	108,29%

Tabel 29. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2010 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.605.061.280	2.057.407.437	78,98%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	181.128.000	194.295.750	107,27%
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	3.400.000.000	4.846.180.214	142,53%
14	Ret. Ijin Gangguan	700.000.000	812.715.000	116,10%
15	Ret. Ijin Trayek	7.500.000	9.635.000	128,47%
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	5.499.000.000	7.601.982.568	138,24%
17	IUJK	13.000.000	23.900.000	183,85%
18	Ijin Usaha Perdagangan	88.190.000	140.830.000	159,69%
19	Tanda Daftar Industri	9.100.000	11.150.000	122,53%
20	Ret. Pelatihan BLK	36.000.000	26.030.900	72,31%
21	Ret. Tower	3.000.000.000	1.681.250.000	56,04%
	Jumlah	58.782.501.680	58.919.339.061	100,23%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 30. Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun \ Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Ret. Pelayanan Kesehatan	103,24%	102,33%	103,43%	91,71%	94,79%	96,64%	Tidak Efektif
Ret. Pelayanan Persampahan	105,35%	85,99%	105,06%	116,74%	113,20%	105,27%	Efektif
Ret. Cetak KTP	118,19%	111,71%	119,04%	89,61%	79,66%	103,64%	Efektif
Ret. Cetak Akte Capil	92,77%	102,99%	111,10%	116,86%	79,30%	100,60%	Efektif
Ret. Parkir Jalan Umum	103,71%	162,49%	82,89%	102,65%	102,76%	110,90%	Efektif
Ret. Pasar	93,61%	119,36%	105,56%	110,67%	101,88%	106,22%	Efektif
Ret. Pengujian Kendaraan Motor	97,77%	103,83%	101,70%	103,08%	105,46%	102,37%	Efektif
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	96,30%	129,57%	120,47%	159,73%	133,17%	127,85%	Efektif
Ret. Jasa Usaha Terminal	86,72%	95,79%	128,00%	114,84%	109,59%	106,99%	Efektif
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	78,72%	94,68%	100,03%	79,37%	108,29%	92,22%	Tidak Efektif
Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	102,97%	116,12%	130,19%	176,11%	78,98%	120,87%	Efektif
Ret. Penjualan Produk Daerah	77,29%	85,44%	78,52%	104,94%	107,27%	90,69%	Tidak Efektif

Tabel 30. Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah (Lanjutan)

Tahun \ Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Ret. Ijin Gangguan	98,52%	115,53%	115,75%	130,29%	116,10%	115,24%	Efektif
Ret. Ijin Trayek	91,69%	104,20%	108,37%	121,08%	128,47%	110,76%	Efektif
Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	116,21%	101,43%	185,11%	151,97%	138,24%	138,59%	Efektif
IUJK	196,74%	181,54%	143,56%	383,85%	183,85%	217,91%	Efektif
Ijin Usaha Perdagangan	132,16%	143,77%	129,99%	136,88%	159,69%	140,50%	Efektif
Tanda Daftar Industri	104,95%	127,59%	129,26%	138,74%	122,53%	124,61%	Efektif
Ret. Pelatihan BLK	99,99%	99,96%	79,17%	72,24%	72,31%	84,73%	Tidak Efektif
Ret. Tower	158,93%	93,91%	162,56%	150,82%	56,04%	124,45%	Efektif
Rata-rata						116,47%	

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 96,94%, dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 100 persen dan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 105,27%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi cetak KTP pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 103,64%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

- d. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi cetak akte capil pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 100,60%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- e. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir jalan umum pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 110,90%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- f. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pasar pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 106,22%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- g. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 102,37%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

- h. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 127,85%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- i. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha terminal pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 106,99%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- j. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong hewan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 92,22%, dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 100 persen dan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- k. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi OR pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 120,87%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- l. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi penjualan produk daerah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 90,69%, dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya

kurang dari 100 persen dan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

- m. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 124,80%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- n. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin gangguan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 115,24%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- o. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin trayek pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 110,76%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- p. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 138,59%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

- q. Rata-rata efektivitas penerimaan IUJK pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 217,91%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- r. Rata-rata efektivitas penerimaan ijin usaha perdagangan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 140,50%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- s. Rata-rata efektivitas penerimaan tanda daftar industri pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 124,61%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- t. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pelatihan BLK pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 84,73%, dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 100 persen dan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.
- u. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi tower pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 124,45%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

C. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak dan Retribusi daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak atau retribusi daerah dalam tahun tertentu mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

Apabila tingkat pertumbuhan pajak atau retribusi daerah positif maka pajak atau retribusi daerah tersebut mengalami kenaikan dan dikatakan potensial, sedangkan apabila tingkat pertumbuhan pajak atau retribusi daerah negatif maka pajak atau retribusi daerah tersebut mengalami penurunan dan dikatakan tidak potensial. (Haning dan Radianto, 2005)

Untuk mengetahui laju pertumbuhan menggunakan rumus:

1. Pajak Daerah

$$\Delta_x = \frac{X_a - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Δ_x : rasio pertumbuhan pajak daerah

X_a : jumlah jenis pajak daerah tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: jumlah jenis pajak daerah tahun sebelumnya

Contoh perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel tahun 2007

$$\Delta_x = \frac{11.423.620.418,85 - 9.761.983.321,60}{9.761.983.321,60} \times 100\%$$

$$\Delta_x = 17,02\%$$

Tabel 31. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi		
		2006	2007	Laju pertumbuhan
1	Pajak Hotel	9.761.983.321,60	11.423.620.418,85	17,02%
2	Pajak Restoran	3.443.232.572,05	5.320.503.571,82	54,52%
3	Pajak Hiburan	959.443.926,28	2.035.377.677,33	112,14%
4	Pajak Reklame	4.454.870.681,39	4.749.917.481,91	6,62%
5	Pajak Penerangan Jalan	18.652.038.103,00	25.705.707.427,00	37,82%
6	Pajak PPBGGC	304.833.900,00	633.093.975,00	107,68%
7	Pajak Parkir	402.910.870,00	419.445.180,00	4,10%
	Jumlah	37.979.313.374,32	50.287.665.732,00	32,41%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 32. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2008

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi		
		2007	2008	Laju pertumbuhan
1	Pajak Hotel	11.423.620.418,85	14.522.397.204,16	27,13%
2	Pajak Restoran	5.320.503.571,82	6.675.522.008,57	25,47%
3	Pajak Hiburan	2.035.377.677,33	3.553.667.031,10	74,59%
4	Pajak Reklame	4.749.917.481,91	8.147.022.563,37	71,52%
5	Pajak Penerangan Jalan	25.705.707.427,00	26.921.123.335,00	4,73%
6	Pajak PPBGGC	633.093.975,00	551.072.688,50	-12,96%
7	Pajak Parkir	419.445.180,00	650.094.300,00	54,99%
	Jumlah	50.287.665.732,00	61.020.899.131,00	21,34%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 33. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2009

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi		
		2008	2009	Laju pertumbuhan
1	Pajak Hotel	14.522.397.204,16	18.189.624.204,48	25,25%
2	Pajak Restoran	6.675.522.008,57	7.628.940.657,53	14,28%
3	Pajak Hiburan	3.553.667.031,10	3.637.358.441,16	2,36%
4	Pajak Reklame	8.147.022.563,37	9.010.860.114,49	10,60%
5	Pajak Penerangan Jalan	26.921.123.335,00	31.190.111.489,00	15,86%
6	Pajak PPBGGC	551.072.688,50	662.441.550,00	20,21%
7	Pajak Parkir	650.094.300,00	725.394.650,00	11,58%
	Jumlah	61.020.899.131,00	71.044.731.107,00	16,43%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 34. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi		
		2009	2010	Laju pertumbuhan
1	Pajak Hotel	18.189.624.204,48	22.473.840.945,14	23,55%
2	Pajak Restoran	7.628.940.657,53	10.195.038.726,88	33,64%
3	Pajak Hiburan	3.637.358.441,16	3.786.482.376,85	4,10%
4	Pajak Reklame	9.010.860.114,49	9.066.604.451,65	0,62%
5	Pajak Penerangan Jalan	31.190.111.489,00	33.619.390.346,00	7,79%
6	Pajak PPBGGC	662.441.550,00	699.977.655,00	5,67%
7	Pajak Parkir	725.394.650,00	770.208.454,00	6,18%
	Jumlah	71.044.731.107,00	80.611.542.956,00	13,47%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 35. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2006-2010

Tahun \ Jenis Pajak	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Pajak Hotel	0	17,02%	27,13%	25,25%	23,55%	23,24%
Pajak Restoran	0	54,52%	25,47%	14,28%	33,64%	31,98%
Pajak Hiburan	0	112,14%	74,59%	2,36%	4,10%	48,30%
Pajak Reklame	0	6,62%	71,52%	10,60%	0,62%	22,34%
Pajak Penerangan Jalan	0	37,82%	4,73%	15,86%	7,79%	16,55%
Pajak PPBGGC	0	107,68%	-12,96%	20,21%	5,67%	30,15%
Pajak Parkir	0	4,10%	54,99%	11,58%	6,18%	19,21%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 23,24% yang berarti pajak hotel mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- b. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 31,98% yang berarti pajak restoran mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.

- c. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 48,30% yang berarti pajak hiburan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- d. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 22,34% yang berarti pajak reklame mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- e. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,55% yang berarti pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- f. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,15% yang berarti pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. Namun di tahun 2008 mengalami penurunan yang disebabkan karena material yang sangat minim.
- g. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,21% yang berarti pajak parkir mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.

2. Retribusi Daerah

$$\Delta_x = \frac{X_a - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Δ_x : rasio pertumbuhan pajak daerah

X_a : jumlah jenis pajak daerah tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: jumlah jenis pajak daerah tahun sebelumnya

Contoh perhitungan laju pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan tahun

2007

$$\Delta x = \frac{24.606.259.953 - 19.819.025.001}{19.819.025.001} \times 100\%$$

$$\Delta x = 24,15\%$$

Tabel 36. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2007

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi		
		2006	2007	Laju pertumbuhan
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	19.819.025.001	24.606.259.953	24,15%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	763.810.650	666.455.200	-12,75%
3	Ret. Cetak KTP	768.237.500	918.738.000	19,59%
4	Ret. Cetak akte capil	278.304.600	266.304.100	-4,31%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	207.423.000	446.850.500	115,43%
6	Ret. Pasar	2.433.749.100	2.745.303.900	12,80%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	879.959.000	892.951.500	1,48%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	246.905.300	357.536.723	44,81%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	189.825.000	193.576.950	1,98%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	59.038.600	52.072.407	-11,80%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	422.705.163	608.829.103	44,03%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	195.724.410	181.554.500	-7,24%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	2.630.792.764	1.263.606.708	-51,97%
14	Ret. Izin Gangguan	591.125.000	664.325.000	12,38%
15	Ret. Izin Trayek	7.610.000	7.930.000	4,20%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.602.494.979	3.296.450.564	-8,50%
17	IUJK	45.250.000	23.600.000	-47,85%
18	Izin Usaha Perdagangan	92.515.000	110.705.000	19,66%
19	Tanda Daftar Industri	9.550.000	13.525.000	41,62%

Tabel 36. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2007 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi		
		2006	2007	Laju pertumbuhan
20	Ret. Pelatihan BLK	59.996.000	59.976.000	-0,03%
21	Ret. Tower	1.559.095.650	1.878.125.000	20,46%
	Jumlah	34.863.136.717	39.254.676.108	12,60%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 37. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2008

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi		
		2007	2008	Laju Pertumbuhan
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	24.606.259.953	29.866.288.254	21,38%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	666.455.200	667.660.500	0,18%
3	Ret. Cetak KTP	918.738.000	1.047.439.000	14,01%
4	Ret. Cetak akte capil	266.304.100	305.173.700	14,60%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	446.850.500	331.546.000	-25,80%
6	Ret. Pasar	2.745.303.900	2.850.023.050	3,81%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	892.951.500	915.822.000	2,56%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	357.536.723	471.456.800	31,86%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	193.576.950	296.454.500	53,15%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	52.072.407	55.014.750	5,65%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	608.829.103	643.775.190	5,74%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	181.554.500	183.352.050	0,99%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1.263.606.708	3.955.793.076	213,06%
14	Ret. Izin Gangguan	664.325.000	694.485.000	4,54%
15	Ret. Izin Trayek	7.930.000	8.160.000	2,90%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.296.450.564	6.201.260.390	88,12%
17	IUJK	23.600.000	18.662.500	-20,92%
18	Izin Usaha Perdagangan	110.705.000	110.280.000	-0,38%
19	Tanda Daftar Industri	13.525.000	11.375.000	-15,90%
20	Ret. Pelatihan BLK	59.976.000	47.504.000	-20,79%
21	Ret. Tower	1.878.125.000	3.251.250.000	73,11%
	Jumlah	39.349.562.108	52.057.109.060	32,29%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 38. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2009

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi		
		2008	2009	Laju pertumbuhan
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	29.866.288.254	28.208.534.184	-5,55%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	667.660.500	817.194.100	22,40%
3	Ret. Cetak KTP	1.047.439.000	871.455.500	-16,80%
4	Ret. Cetak akte capil	305.173.700	438.840.700	43,80%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	331.546.000	338.838.500	2,20%
6	Ret. Pasar	2.850.023.050	2.988.086.050	4,84%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	915.822.000	876.145.000	-4,33%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	471.456.800	889.509.800	88,67%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	296.454.500	269.590.300	-9,06%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.014.750	43.656.000	-20,65%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	643.775.190	2.120.312.614	229,36%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	183.352.050	179.575.800	-2,06%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	3.955.793.076	5.193.581.535	31,29%
14	Ret. Izin Gangguan	694.485.000	846.885.000	21,94%
15	Ret. Izin Trayek	8.160.000	9.275.000	13,66%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	6.201.260.390	7.218.400.373	16,40%
17	IUJK	18.662.500	49.900.000	167,38%
18	Izin Usaha Perdagangan	110.280.000	119.345.000	8,22%
19	Tanda Daftar Industri	11.375.000	12.625.000	10,99%
20	Ret. Pelatihan BLK	47.504.000	43.344.000	-8,76%
21	Ret. Tower	3.251.250.000	3.016.437.500	-7,22%
	Jumlah	52.065.472.060	54.685.188.556	5,03%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 39. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2010

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi		
		2009	2010	Laju pertumbuhan
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	28.208.534.184	32.679.740.322	15,85%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	817.194.100	905.595.300	10,82%
3	Ret. Cetak KTP	871.455.500	1.581.770.500	81,51%
4	Ret. Cetak akte capil	438.840.700	382.303.000	-12,88%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	338.838.500	339.216.000	0,11%
6	Ret. Pasar	2.988.086.050	3.272.564.550	9,52%

Tabel 39. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2010 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi		
		2009	2010	Laju Pertumbuhan
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	876.145.000	896.407.000	2,31%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	889.509.800	1.232.148.500	38,52%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	269.590.300	253.657.550	-5,91%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	43.656.000	33.559.500	-23,13%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.120.312.614	2.957.407.437	39,48%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	179.575.800	194.295.750	8,20%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	5.193.581.535	4.846.180.214	-6,69%
14	Ret. Izin Gangguan	846.885.000	812.715.000	-4,03%
15	Ret. Izin Trayek	9.275.000	9.635.000	3,88%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	7.218.400.373	7.601.982.568	5,31%
17	IUJK	49.900.000	23.900.000	-52,10%
18	Izin Usaha Perdagangan	119.345.000	140.830.000	18,00%
19	Tanda Daftar Industri	12.625.000	11.150.000	-11,68%
20	Ret. Pelatihan BLK	43.344.000	26.030.900	-39,94%
21	Ret. Tower	3.016.437.500	1.681.250.000	-44,26%
	Jumlah	54.676.094.556	59.746.932.391	9,27%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 40. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2006-2010

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Retribusi Daerah						
Ret. Pelayanan Kesehatan	0	24,15%	21,38%	-5,55%	15,85%	13,96%
Ret. Pelayanan Persampahan	0	-12,75%	0,18%	22,40%	10,82%	5,16%
Ret. Cetak KTP	0	19,59%	14,01%	-16,80%	81,51%	24,58%
Ret. Cetak Akte Capil	0	-4,31%	14,60%	43,80%	-12,88%	10,30%
Ret. Parkir Jalan Umum	0	115,43%	-25,80%	2,20%	0,11%	22,99%
Ret. Pasar	0	12,80%	3,81%	4,84%	9,52%	7,74%
Ret. Pengujian Kendaraan Motor	0	1,48%	2,56%	-4,33%	2,31%	0,51%
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0	44,81%	31,86%	88,67%	38,52%	50,97%

Tabel 40. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2006-2010 (Lanjutan)

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Retribusi Daerah						
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	0	-11,80%	5,65%	-20,65%	-23,13%	-12,48%
Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	44,03%	5,74%	229,36%	39,48%	79,65%
Ret. Penjualan Produk Daerah	0	-7,24%	0,99%	-2,06%	8,20%	-0,03%
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	0	-51,97%	213,06%	31,29%	-6,69%	46,42%
Ret. Ijin Gangguan	0	12,38%	4,54%	21,94%	-4,03%	8,71%
Ret. Ijin Trayek	0	4,20%	2,90%	13,66%	3,88%	6,16%
Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	0	-8,50%	88,12%	16,40%	5,31%	25,33%
IUJK	0	-47,85%	-20,92%	167,38%	-52,10%	11,63%
Ijin Usaha Perdagangan	0	19,66%	-0,38%	8,22%	18,00%	11,38%
Tanda Daftar Industri	0	41,62%	-15,90%	10,99%	-11,68%	6,26%
Ret. Pelatihan BLK	0	-0,03%	-20,79%	-8,76%	-39,94%	-17,38%
Ret. Tower	0	20,46%	73,11%	-7,22%	-44,26%	10,52%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,96% yang berarti retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- b. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami

pertumbuhan positif sebesar 5,16% yang berarti retribusi pelayanan persampahan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.

- c. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi cetak KTP di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 24,58% yang berarti retribusi cetak KTP mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- d. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi cetak akte capil di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,30% yang berarti retribusi cetak akte capil mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- e. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi parkir jalan umum di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 22,99% yang berarti retribusi parkir jalan umum mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- f. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,74% yang berarti retribusi pasar mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- g. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,51% yang berarti retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.

- h. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 50,97% yang berarti retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- i. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha terminal di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,04% yang berarti retribusi jasa usaha terminal mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- j. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong hewan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -12,48% yang berarti retribusi jasa usaha rumah potong hewan mengalami penurunan dan dikatakan tidak potensial.
- k. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi OR di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 79,65% yang berarti retribusi jasa usaha tempat rekreasi OR mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- l. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi penjualan produk daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,03% yang berarti retribusi penjualan produk daerah mengalami penurunan dan dikatakan tidak potensial.

- m. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 46,42% yang berarti retribusi ijin mendirikan bangunan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- n. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin gangguan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,71% yang berarti retribusi ijin gangguan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- o. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin trayek di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,16% yang berarti retribusi ijin trayek mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- p. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 25,33% yang berarti ijin peruntukan penggunaan tanah mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- q. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan IUJK di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,63% yang berarti IUJK mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- r. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan ijin usaha perdagangan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif

sebesar 11,38% yang berarti ijin usaha perdagangan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.

- s. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan tanda daftar industri di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,26% yang berarti tanda daftar industri mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.
- t. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelatihan BLK di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -17,38% yang berarti retribusi pelatihan BLK mengalami penurunan dan dikatakan tidak potensial.
- u. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi tower di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,52% yang berarti retribusi tower mengalami kenaikan dan dikatakan potensial.

D. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah. Dalam menghitung kontribusi jenis pajak dan retribusi daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005) dengan cara mengambil rata-rata dari tujuh pajak daerah dan mengambil rata-rata dari dua puluh satu retribusi daerah sebagai tolok ukur.

Apabila rata-rata jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila rata-rata

jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan potensial. Apabila rata-rata jenis retribusi daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis retribusi daerah lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan potensial. (Haning dan Radianto, 2005)

Untuk mengetahui tingkat kontribusi menggunakan rumus:

1. Pajak Daerah

$$Kontribusi = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah

Y : Realisasi penerimaan pajak daerah

Contoh perhitungan kontribusi pajak hotel tahun 2006:

$$2006 = \frac{9.761.983.321,60}{37.979.313.374,32} = 25,70\%$$

Tabel 41. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2006

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Pajak Hotel	9.761.983.321,60	25,70%
2	Pajak Restoran	3.443.232.572,05	9,07%
3	Pajak Hiburan	959.443.926,28	2,53%
4	Pajak Reklame	4.454.870.681,39	11,73%
5	Pajak Penerangan Jalan	18.652.038.103,00	49,11%
6	Pajak PPBGGC	304.833.900,00	0,80%
7	Pajak Parkir	402.910.870,00	1,06%
	Jumlah	37.979.313.374,32	100,00%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 42. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Pajak Hotel	11.423.620.418,85	22,72%
2	Pajak Restoran	5.320.503.571,82	10,58%
3	Pajak Hiburan	2.035.377.677,33	4,05%

Tabel 42. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2007 (Lanjutan)

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi
4	Pajak Reklame	4.749.917.481,91	9,45%
5	Pajak Penerangan Jalan	25.705.707.427	51,12%
6	Pajak PPBGGC	633.093.975	1,26%
7	Pajak Parkir	419.445.180	0,83%
	Jumlah	50.287.665.732	100,00%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 43. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2008

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Pajak Hotel	14.522.397.204,16	23,80%
2	Pajak Restoran	6.675.522.008,57	10,94%
3	Pajak Hiburan	3.553.667.031,10	5,82%
4	Pajak Reklame	8.147.022.563,37	13,35%
5	Pajak Penerangan Jalan	26.921.123.335,00	44,12%
6	Pajak PPBGGC	551.072.688,50	0,90%
7	Pajak Parkir	650.094.300,00	1,07%
	Jumlah	61.020.899.131	100,00%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 44. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2009

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Pajak Hotel	18.189.624.204,48	25,60%
2	Pajak Restoran	7.628.940.657,53	10,74%
3	Pajak Hiburan	3.637.358.441,16	5,12%
4	Pajak Reklame	9.010.860.114,49	12,68%
5	Pajak Penerangan Jalan	31.190.111.489,00	43,90%
6	Pajak PPBGGC	662.441.550,00	0,93%
7	Pajak Parkir	725.394.650,00	1,02%
	Jumlah	71.044.731.107	100,00%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 45. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Pajak Hotel	22.473.840.945,14	27,88%
2	Pajak Restoran	10.195.038.726,88	12,65%
3	Pajak Hiburan	3.786.482.376,85	4,70%
4	Pajak Reklame	9.066.604.451,65	11,25%
5	Pajak Penerangan Jalan	33.619.390.346,00	41,71%
6	Pajak PPBGGC	699.977.655,00	0,87%
7	Pajak Parkir	770.208.454,00	0,96%
	Jumlah	80.611.542.956	100,00%

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 46. Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2006-2010

Tahun Jenis Pajak	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Pajak Hotel	25,70%	22,72%	23,80%	25,60%	27,88%	25,14%	Potensial
Pajak Restoran	9,07%	10,58%	10,94%	10,74%	12,65%	10,80%	Tidak Potensial
Pajak Hiburan	2,53%	4,05%	5,82%	5,12%	4,70%	4,44%	Tidak Potensial
Pajak Reklame	11,73%	9,45%	13,35%	12,68%	11,25%	11,69%	Tidak Potensial
Pajak Penerangan Jalan	49,11%	51,12%	44,12%	43,90%	41,71%	45,99%	Potensial
Pajak PPBGGC	0,80%	1,26%	0,90%	0,93%	0,87%	0,95%	Tidak Potensial
Pajak Parkir	1,06%	0,83%	1,07%	1,02%	0,96%	0,99%	Tidak Potensial
Rata-rata						14,29%	

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 25,14% melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa kontribusi pajak hotel dikategorikan potensial.
- b. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 10,80% tidak melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak restoran dikategorikan tidak potensial.
- c. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 4,44% tidak melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak hotel dikategorikan tidak potensial.

- d. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 11,69% tidak melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak reklame dikategorikan tidak potensial.
- e. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 45,99% melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak penerangan jalan dikategorikan potensial.
- f. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,95% tidak melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dikategorikan tidak potensial.
- g. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,99% tidak melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak parkir dikategorikan potensial.

2. Retribusi Daerah

$$Kontribusi = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi penerimaan jenis retribusi daerah

Y : Realisasi retribusi daerah

Contoh perhitungan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2006

$$\begin{aligned} 2006 &= \frac{19.819.025.001}{34.863.136.717} \\ &= 56,85\% \end{aligned}$$

Tabel 47. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2006

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	19.819.025.001	56,85%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	763.810.650	2,19%
3	Ret. Cetak KTP	768.237.500	2,20%
4	Ret. Cetak akte capil	278.304.600	0,80%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	207.423.000	0,59%
6	Ret. Pasar	2.433.749.100	6,98%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	879.959.000	2,52%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	246.905.300	0,71%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	189.825.000	0,54%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	59.038.600	0,17%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	422.705.163	1,21%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	195.724.410	0,56%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	2.630.792.764,03	7,55%
14	Ret. Izin Gangguan	591.125.000	1,70%
15	Ret. Izin Trayek	7.610.000	0,02%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.602.494.978,80	10,33%
17	IUJK	45.250.000	0,13%
18	Izin Usaha Perdagangan	92.515.000	0,27%
19	Tanda Daftar Industri	9.550.000	0,03%
20	Ret. Pelatihan BLK	59.996.000	0,17%
21	Ret. Tower	1.559.095.650	4,47%
	Jumlah	34.863.136.717	100,00%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 48. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2007

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	24.606.259.953	62,68%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	666.455.200	1,70%
3	Ret. Cetak KTP	918.738.000	2,34%
4	Ret. Cetak akte capil	266.304.100	0,68%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	446.850.500	1,14%
6	Ret. Pasar	2.745.303.900	6,99%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	892.951.500	2,27%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	357.536.723	0,91%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	193.576.950	0,49%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	52.072.407	0,13%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	608.829.103	1,55%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	181.554.500	0,46%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1.263.606.708	3,22%
14	Ret. Izin Gangguan	664.325.000	1,69%
15	Ret. Izin Trayek	7.930.000	0,02%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	3.296.450.564	8,40%
17	IUJK	23.600.000	0,06%
18	Izin Usaha Perdagangan	110.705.000	0,28%
19	Tanda Daftar Industri	13.525.000	0,03%
20	Ret. Pelatihan BLK	59.976.000	0,15%

Tabel 48. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2007 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
21	Ret. Tower	1.878.125.000	4,78%
	Jumlah	39.254.676.108	100,00%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 49. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2008

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	29.866.288.254	57,51%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	667.660.500	1,29%
3	Ret. Cetak KTP	1.047.439.000	2,02%
4	Ret. Cetak akte capil	305.173.700	0,59%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	331.546.000	0,64%
6	Ret. Pasar	2.850.023.050	5,49%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	915.822.000	1,76%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	471.456.800	0,91%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	296.454.500	0,57%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	55.014.750	0,11%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	643.775.190	1,24%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	183.352.050	0,35%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	3.955.793.076	7,62%
14	Ret. Izin Gangguan	694.485.000	1,34%
15	Ret. Izin Trayek	8.160.000	0,02%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	6.201.260.390	11,94%
17	IUJK	18.662.500	0,04%
18	Izin Usaha Perdagangan	110.280.000	0,21%
19	Tanda Daftar Industri	11.375.000	0,02%
20	Ret. Pelatihan BLK	47.504.000	0,09%
21	Ret. Tower	3.251.250.000	6,26%
	Jumlah	51.932.775.760	100,00%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 50. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2009

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	28.208.534.183,80	51,71%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	817.194.100	1,50%
3	Ret. Cetak KTP	871.455.500	1,60%
4	Ret. Cetak akte capil	438.840.700	0,80%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	338.838.500	0,62%
6	Ret. Pasar	2.988.086.050	5,48%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	876.145.000	1,61%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	889.509.800	1,63%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	269.590.300	0,49%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	43.656.000	0,08%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.120.312.614	3,89%

Tabel 50. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2009 (Lanjutan)

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	179.575.800	0,33%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	5.193.581.534,65	9,52%
14	Ret. Izin Gangguan	846.885.000	1,55%
15	Ret. Izin Trayek	9.275.000	0,02%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	7.218.400.373,45	13,23%
17	IUJK	49.900.000	0,09%
18	Izin Usaha Perdagangan	119.345.000	0,22%
19	Tanda Daftar Industri	12.625.000	0,02%
20	Ret. Pelatihan BLK	43.344.000	0,08%
21	Ret. Tower	3.016.437.500	5,53%
	Jumlah	54.551.531.956	100,00%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 51. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total Retribusi Daerah Tahun 2010

No	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Kontribusi
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	32.679.740.322	55,59%
2	Ret. Pelayanan Persampahan	905.595.300	1,54%
3	Ret. Cetak KTP	1.518.770.500	2,58%
4	Ret. Cetak akte capil	382.303.000	0,65%
5	Ret. Parkir Jalan Umum	339.216.000	0,58%
6	Ret. Pasar	3.272.564.550	5,57%
7	Ret. Pengujian Kendaraan Motor	896.407.000	1,52%
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	1.232.148.500	2,10%
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	253.657.550	0,43%
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	33.559.500	0,06%
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.057.407.437	3,50%
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	194.295.750	0,33%
13	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	4.846.180.214	8,24%
14	Ret. Izin Gangguan	812.715.000	1,38%
15	Ret. Izin Trayek	9.635.000	0,02%
16	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	7.601.982.568	12,93%
17	IUJK	23.900.000	0,04%
18	Izin Usaha Perdagangan	140.830.000	0,24%
19	Tanda Daftar Industri	11.150.000	0,02%
20	Ret. Pelatihan BLK	26.030.900,00	0,04%
21	Ret. Tower	1.681.250.000	2,86%
	Jumlah	58.783.932.392	100,00%

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 52. Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Retribusi Total Daerah Tahun 2006-2010

Tahun \ Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Ret. Pelayanan Kesehatan	56,85%	62,68%	57,51%	51,71%	55,59%	56,87%	Potensial
Ret. Pelayanan Persampahan	2,19%	1,70%	1,29%	1,50%	1,54%	1,64%	Tidak Potensial
Ret. Cetak KTP	2,20%	2,34%	2,02%	1,60%	2,58%	2,15%	Tidak Potensial
Ret. Cetak Akte Capil	0,80%	0,68%	0,59%	0,80%	0,65%	0,70%	Tidak Potensial
Ret. Parkir Jalan Umum	0,59%	1,14%	0,64%	0,62%	0,58%	0,71%	Tidak Potensial
Ret. Pasar	6,98%	6,99%	5,49%	5,48%	5,57%	6,10%	Potensial
Ret. Pengujian Kendaraan Motor	2,52%	2,27%	1,76%	1,61%	1,52%	1,94%	Tidak Potensial
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0,71%	0,91%	0,91%	1,63%	2,10%	1,25%	Tidak Potensial
Ret. Jasa Usaha Terminal	0,54%	0,49%	0,57%	0,49%	0,43%	0,50%	Tidak Potensial
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	0,17%	0,13%	0,11%	0,08%	0,06%	0,11%	Tidak Potensial
Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,21%	1,55%	1,24%	3,89%	3,50%	2,28%	Tidak Potensial
Ret. Penjualan Produk Daerah	0,56%	0,46%	0,35%	0,33%	0,33%	0,41%	Tidak Potensial
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	7,55%	3,22%	7,62%	9,52%	8,24%	7,23%	Potensial
Ret. Ijin Gangguan	1,70%	1,69%	1,34%	1,55%	1,38%	1,53%	Tidak Potensial
Ret. Ijin Trayek	0,022%	0,020%	0,016%	0,17%	0,16%	0,18%	Tidak Potensial
Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	10,33%	8,40%	11,94%	13,23%	12,93%	11,37%	Potensial
IUJK	0,13%	0,06%	0,04%	0,09%	0,04%	0,07%	Tidak Potensial
Ijin Usaha Perdagangan	0,27%	0,28%	0,21%	0,22%	0,24%	0,244%	Tidak Potensial

Tabel 52. Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Retribusi Total Daerah Tahun 2006-2010 (Lanjutan)

Tahun \ Retribusi Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata	Keterangan
Ret. Pelatihan BLK	0,17%	0,15%	0,09%	0,08%	0,04%	0,11%	Tidak Potensial
Ret. Tower	4,472%	4,784%	6,260%	5,530%	2,860%	4,781%	Potensial
Rata-rata						4,76%	

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 56,87% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pelayanan kesehatan dikategorikan potensial.
- b. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 1,64% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pelayanan persampahan dikategorikan tidak potensial.
- c. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi cetak KTP terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 2,15% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi cetak KTP dikategorikan tidak potensial.
- d. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi cetak akte capil terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,70% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi cetak akte capil dikategorikan tidak potensial.

- e. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir jalan umum terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,71% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi parkir jalan umum dikategorikan tidak potensial.
- f. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 6,10% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pasar dikategorikan potensial.
- g. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 1,94% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pengujian kendaraan bermotor dikategorikan tidak potensial.
- h. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 1,25% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah dikategorikan tidak potensial.
- i. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terminal terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,50% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi jasa usaha terminal dikategorikan tidak potensial.

- j. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong hewan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,11% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi jasa usaha rumah potong hewan dikategorikan tidak potensial.
- k. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi OR terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 2,28% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi jasa usaha tempat rekreasi OR dikategorikan tidak potensial.
- l. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi penjualan produk daerah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,41% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi penjualan produk daerah dikategorikan tidak potensial.
- m. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 7,23% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi ijin mendirikan bangunan dikategorikan potensial.
- n. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin gangguan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 1,53% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi ijin gangguan dikategorikan tidak potensial.

- o. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin trayek terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,018% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi ijin trayek dikategorikan tidak potensial.
- p. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 11,37% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti ijin peruntukan penggunaan tanah dikategorikan potensial.
- q. Rata-rata kontribusi penerimaan IUJK terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,07% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti IUJK dikategorikan tidak potensial.
- r. Rata-rata kontribusi penerimaan ijin usaha perdagangan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,244% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti ijin usaha perdagangan dikategorikan tidak potensial.
- s. Rata-rata kontribusi penerimaan tanda daftar industri terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,025% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti tanda daftar industri dikategorikan tidak potensial.
- t. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pelatihan BLK terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,11%

tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pelatihan BLK dikategorikan tidak potensial.

- u. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi tower terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 4,781% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi tower dikategorikan potensial.

E. Analisis Matriks Potensi

Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah objek pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

Untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005). Dalam menentukan apakah objek pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang, kriteria yang digunakan sebagai berikut: (Haning dan Radianto, 2005).

- a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial.
- b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial.
- c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial.
- d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima berarti Pemerintah Daerah sudah baik dalam mengelola jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil.

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori potensial berarti pajak dan retribusi daerah tersebut berpeluang menjadi andalan Pemerintah Daerah karena memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun karena pengelolaan yang belum baik menyebabkan pertumbuhan tidak stabil.

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori berkembang berarti tingkat pertumbuhan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut semakin meningkat atau cenderung stabil namun karena bukan sektor andalan sehingga memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori terbelakang berarti pajak dan retribusi daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa.

1. Pajak Daerah

Tabel 53. Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbuhan (Gx)	Koefisien Kontribusi (X/Y)	Kriteria
1	Pajak Hotel	Positif	Potensial	Prima
2	Pajak Restoran	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
3	Pajak Hiburan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
4	Pajak Reklame	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
5	Pajak Penerangan Jalan	Positif	Potensial	Prima
6	Pajak PPBGGC	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
7	Pajak Parkir	Positif	Tidak Potensial	Berkembang

Keterangan :

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Pajak hotel dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola pajak hotel dengan baik dan pajak hotel merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah.
- b. Pajak restoran dikategorikan berkembang yang berarti pajak restoran bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- c. Pajak hiburan dikategorikan berkembang yang berarti pajak hiburan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- d. Pajak reklame dikategorikan berkembang yang berarti pajak reklame bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena

memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.

- e. Pajak penerangan jalan dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola pajak penerangan jalan dengan baik dan pajak penerangan jalan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah.
- f. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dikategorikan berkembang yang berarti pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- g. Pajak parkir dikategorikan berkembang yang berarti pajak parkir bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.

2. Retribusi Daerah

Tabel 54. Matriks Potensi Jenis Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbuhan (GX)	Koefisien Kontribusi (Xi/X)	Kriteria
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	Positif	Potensial	Prima
2	Ret. Pelayanan Persampahan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
3	Ret. Cetak KTP	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
4	Ret .Cetak Akte Capil	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
5	Ret. Parkir Jalan Umum	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
6	Ret. Pasar	Positif	Potensial	Prima

Tabel 54. Matriks Potensi Jenis Retribusi Daerah (Lanjutan)

No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbuhan (GX)	Koefisien Kontribusi (Xi/X)	Kriteria
8	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
9	Ret. Jasa Usaha Terminal	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
10	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Negatif	Tidak Potensial	Terbelakang
11	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
12	Ret. Penjualan Produk Daerah	Negatif	Tidak Potensial	Terbelakang
13	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	Positif	Potensial	Prima
14	Ret. Ijin Gangguan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
15	Ret. Ijin Trayek	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
16	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Positif	Potensial	Prima
17	IUJK	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
18	Ijin Usaha Perdagangan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
19	Tanda Daftar Industri	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
20	Ret. Pelatihan BLK	Negatif	Tidak Potensial	Terbelakang
21	Ret. Tower	Positif	Tidak Potensial	Berkembang

Keterangan:

Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi pelayanan kesehatan dengan baik dan retribusi pelayanan kesehatan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah.
- b. Retribusi pelayanan persampahan dikategorikan berkembang yang berarti retribusi pelayanan persampahan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang

sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.

- c. Retribusi cetak KTP dikategorikan berkembang yang berarti retribusi cetak KTP bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- d. Retribusi cetak akte capil dikategorikan berkembang yang berarti retribusi cetak akte capil bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- e. Retribusi parkir jalan umum dikategorikan berkembang yang berarti retribusi parkir jalan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- f. Retribusi pasar dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi pasar dengan baik dan retribusi pasar merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah.
- g. Retribusi pengujian kendaraan motor dikategorikan berkembang yang berarti retribusi pengujian kendaraan motor bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.

- h. Retribusi jasa pemakaian daerah dikategorikan berkembang yang berarti retribusi jasa pemakaian daerah bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- i. Retribusi jasa usaha terminal dikategorikan berkembang yang berarti retribusi jasa usaha terminal bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- j. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan dikategorikan terbelakang yang berarti retribusi jasa usaha rumah potong hewan tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan sebaiknya tidak dipungut.
- k. Retribusi jasa tempat rekreasi OR dikategorikan berkembang yang berarti retribusi jasa tempat rekreasi OR bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- l. Retribusi penjualan produk daerah dikategorikan terbelakang yang berarti retribusi penjualan produk daerah tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan sebaiknya tidak dipungut.
- m. Retribusi ijin mendirikan bangunan dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi ijin mendirikan

bangunan dengan baik dan retribusi ijin mendirikan bangunan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah.

- n. Retribusi ijin gangguan dikategorikan berkembang yang berarti Retribusi ijin gangguan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- o. Retribusi ijin trayek dikategorikan berkembang yang berarti retribusi ijin trayek bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- p. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dengan baik dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah
- q. IUJK dikategorikan berkembang yang berarti IUJK bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- r. Ijin usaha perdagangan dikategorikan berkembang yang berarti Ijin usaha perdagangan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah

Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.

- s. Tanda daftar industri dikategorikan berkembang yang berarti Tanda daftar industri bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.
- t. Retribusi pelatihan BLK dikategorikan terbelakang yang berarti retribusi pelatihan BLK tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan sebaiknya tidak dipungut.
- u. Retribusi tower dikategorikan berkembang yang berarti retribusi tower bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis potensi jenis pajak dan jenis retribusi daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, ini berarti Pemerintah Daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, ini berarti Pemerintah Daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa dari jenis retribusi daerah yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, dan retribusi penjualan produk daerah, retribusi pelatihan BLK.

2. Laju Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami pertumbuhan positif, ini berarti semua jenis pajak daerah mengalami kenaikan dan dapat dikatakan potensial.

Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami tingkat pertumbuhan positif, ini berarti masing-masing jenis retribusi daerah mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. Namun ada beberapa dari jenis retribusi daerah yang mengalami tingkat pertumbuhan negatif dan dikatakan tidak potensial, yaitu retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi penjualan produk daerah, dan retribusi pelatihan BLK

3. Kontribusi

Tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dikategorikan tidak potensial. Hanya terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan potensial, yaitu pajak hotel dan pajak penerangan jalan.

Tingkat kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dikategorikan tidak potensial. Hanya terdapat empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan potensial, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah.

4. Matriks Potensi

Dilihat dari matrik potensi, jenis pajak daerah yang dikategorikan prima adalah pajak hotel dan pajak penerangan jalan, ini

berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola pajak hotel dan pajak penerangan jalan dengan baik dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi total pajak daerah.

Dilihat dari matrik potensi, jenis retribusi daerah yang dikategorikan prima adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah., ini berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dengan baik dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi total retribusi daerah.

B. Keterbatasan penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang analisis potensi jenis pajak dan jenis retribusi daerah terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian tersebut adalah sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia yang terbaru yang mulai diterapkan tahun 2011, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Peneliti masih menggunakan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 karena peneliti masih menggunakan data penelitian dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia yang terbaru agar hasil penelitian lebih relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Bagi Pemerintah Daerah

a. Bagi pajak dan retribusi daerah yang sudah berkategori prima bisa dipertahankan, perhatian Pemerintah Daerah ditujukan kepada pajak dan retribusi daerah yang berkategori potensial dan berkembang agar jenis pajak dan retribusi daerah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi total pajak dan retribusi daerah.

b. Pemerintah daerah diharapkan mengembangkan potensi jenis pajak dan retribusi daerah yang ada pada daerah Sleman sehingga jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dapat meningkat setiap tahunnya, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak dan retribusi daerah serta menjadi sektor unggulan dalam pemasukan pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, B. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1. (Februari). No. 1: 66-77.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masrofi, Muhamad. 2004. Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro .
- Mulyanto. 2002. “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp>
- _____. 2004. *Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah*. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf
- _____. 2004. *Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintahan No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf>
- Riyardi, Agung., dkk. 2002. “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi Cetakan 2* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Hg Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://jdih.slemankab.go.id>



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN/PKL

NO. : 070/ 0471

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- 1. Nama : Andreas Suryo Adi
- 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 082114001
- 3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
- 4. Universitas/Akademi : Universitas Sanata Dharma
- 5. Dosen Pembimbing : Firma Sulistyowati, S.E., M.St., QIA
- 6. Alamat Rumah Peneliti : Komplek Polel Bahasan H4, Yogyakarta
- 7. No. Telp/HP : 0856 1068 419
- 8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey : Pemerintah Kabupaten Sleman

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil PKL/ Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/judul :

Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
 studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2010

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
 Pernyataan perijinan Research/Penelitian/PKL yang kami lakukan dalam
 Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 21 Februari 2012

Yang menyatakan

Andreas Suryo Adi



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 0471 / 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi USD Yogyakarta. Nomor: 31/Kaprodi Akt./1016/II/2012. Tanggal: 20 Februari 2012. Hal: Permohonan Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **ANDREAS SURYO ADI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 082114001
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta
Alamat Rumah : Komplek POLRI Balapan H4 Yogyakarta
No. Telp/HP : 08561068419
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Stuu. Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010)"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 21 Februari 2012 s/d 21 Mei 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bul. setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 21 Februari 2012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
4. Ka. Dinas PKAD Kab. Sleman
5. Ka. Dinas Dukcapil Kab. Sleman
6. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Kab. Sleman
7. Ka. BKD kab. Sleman
8. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
9. Ketua Program Studi Akuntansi Fak. Ekonomi – USD Yk.
10. Pertiinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bid. Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

Sri Nurhidayah, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman D.I. Yogyakarta
 Telepon (0274) 868414 Faximile (0274) 868414 Psw 1322 Kode Pos 55511

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/493 /2012

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andreas Suryo Adi
 No. Mahasiswa : 082114001
 Fakultas : Ekonomi
 Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma
 Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian untuk kepentingan penyusunan karya tulis/skripsi dengan judul :

" ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2010 "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

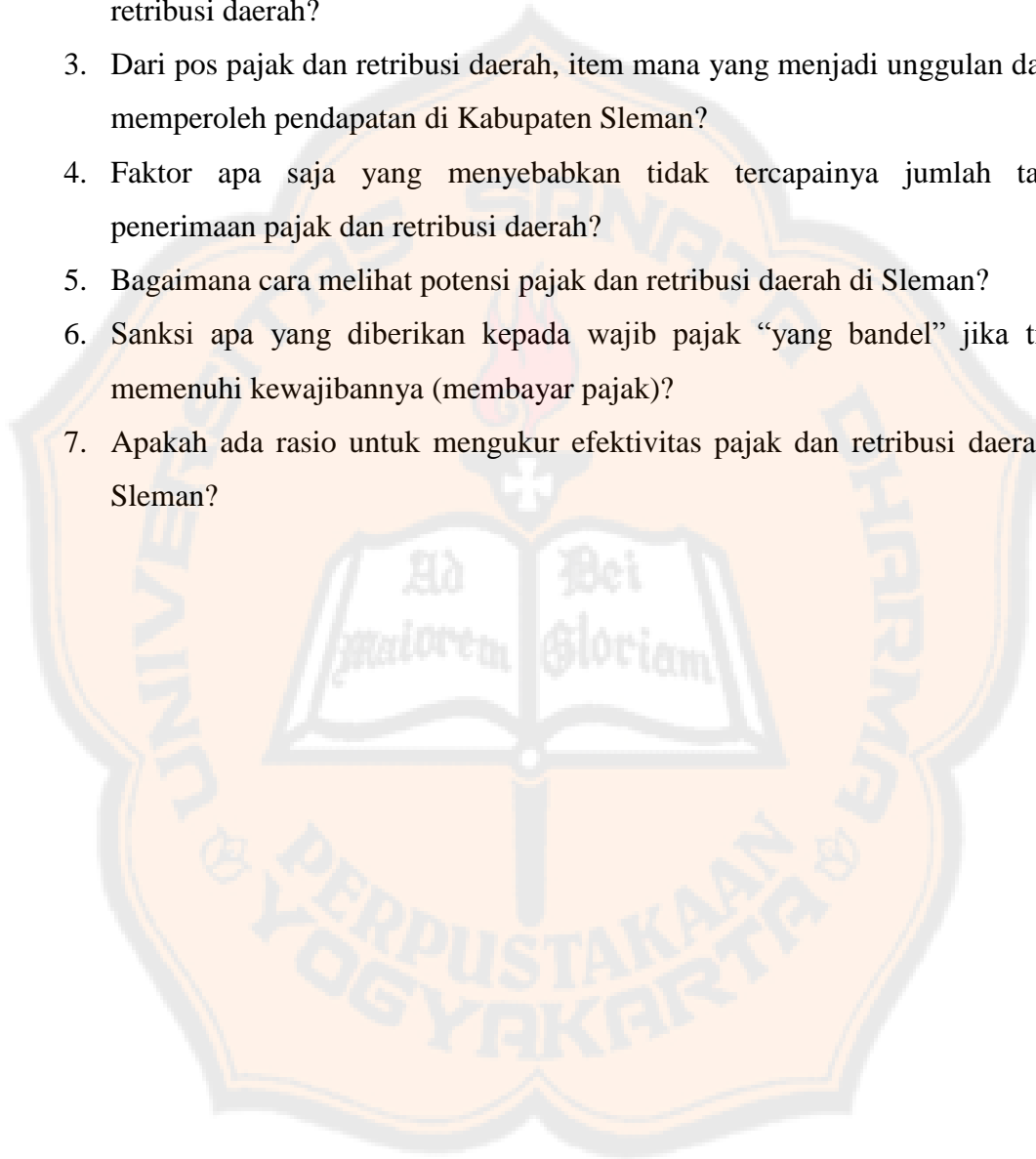
Sleman, 21 Mei 2012
 Kepala DPKAD Kab. Sleman



[Signature]
Dra. Rini Murti Lestari, MM.,Akt.
 NIP: 1960 0607198411 2 001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara penagihan pajak dan retribusi daerah?
2. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan/pemasukan dari pajak dan retribusi daerah?
3. Dari pos pajak dan retribusi daerah, item mana yang menjadi unggulan dalam memperoleh pendapatan di Kabupaten Sleman?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target penerimaan pajak dan retribusi daerah?
5. Bagaimana cara melihat potensi pajak dan retribusi daerah di Sleman?
6. Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak “yang bandel” jika tidak memenuhi kewajibannya (membayar pajak)?
7. Apakah ada rasio untuk mengukur efektivitas pajak dan retribusi daerah di Sleman?



IGL-Pros : 17-01-2007
Jus : 12:19:52
Halaman : 2

PERHIMPATAN KADAMPTEN SIEMAH
REKOR PERSELOAN HUNJAN GOM KEMAYAN -GERUM
LAPORAN REALISASI PELESTARIAN DAERAH
Bulan : Desember Tahun : 2006

No.	Rekening	Jenis Penerimaan	Anggaran	Realisasi Penerimaan		s/d Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	±	sisa terang	sisa lebih	keterangan
				Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya						
112-11-2001-1-0222		REK. HASIL TPT REKREASI OR	410.500.000,00	37.009.550,00	385.695.413,00	422.705.165,00	102,97 %	0,00	12.205.165,00		
11-2001-1-022201		REK. TEMPAT REKREASI 4 OR	293.200.000,00	30.556.650,00	309.792.113,00	340.148.165,00	116,01 %	0,00	46.940.165,00		
11-2001-1-022202		REK. OR M U	15.300.000,00	350.000,00	15.650.000,00	15.300.000,00	100,00 %	0,00	350.000,00		
11-2001-1-022203		REK. PERKAS SEMI	105.300.000,00	6.303.600,00	60.325.900,00	66.027.000,00	65,12 %	35.673.000,00	0,00		
115-11-0701-1-0225		REK. PENJUALAN PPO OASERAH	253.200.000,00	74.800.000,00	170.925.210,00	195.724.410,00	77,29 %	0,00	53.525.590,00		
11-0701-1-022501		REK. PENJUALAN SENJA INDAH	43.500.000,00	12.900.000,00	30.235.500,00	44.136.500,00	101,66 %	0,00	636.500,00		
11-0701-1-022502		REK. PENJUALAN PSL TANAH BPP	128.150.000,00	33.870.000,00	62.712.500,00	96.382.500,00	75,27 %	0,00	31.567.500,00		
11-0701-1-022503		REK. PENY. NSL KERUB SIMBANGAN	2.100.000,00	1.900.000,00	700.000,00	2.100.000,00	100,00 %	0,00	0,00		
11-1401-1-022504		REK. PENJUALAN SPLIT	62.000.000,00	1.900.000,00	25.130.200,00	52.905.410,00	85,33 %	0,00	9.094.590,00		
11-1401-1-022505		REK. PENJUALAN SUMBER BAYAN	17.500.000,00	0,00	0,00	27.775.210,00	0,00 %	0,00	17.500.000,00		
114-11-1401-1-0226		REK. IZIN MENYERIKAN BANGUNAN	2.759.000.000,00	232.894.325,00	2.397.891.329,00	2.630.792.164,00	95,01 %	0,00	129.207.235,97		
11-1401-1-022601-1		REK. IZIN	2.200.000.000,00	21.788.035,00	1.401.692.504,00	1.601.400.539,00	72,89 %	0,00	596.519.460,97		
11-1401-1-022601-2		IZIN PERDAGANGAN	600.000.000,00	21.020.515,00	1.494.083.325,00	515.003.840,00	85,85 %	0,00	84.836.160,00		
11-1401-1-022601-3		IZIN REALESTATE/SWAGATA	1.050.000.000,00	3.757.270,00	551.070.279,00	554.827.549,00	52,84 %	0,00	495.172.450,97		
11-1401-1-022602		IZIN PEREESTAN	500.000.000,00	177.010.250,00	256.578.900,00	533.949.150,00	97,01 %	0,00	16.450.850,00		
11-1401-1-022603		REK. PENELITIAN IZIN	112.500.000,00	10.689.150,00	69.491.918,00	79.581.368,00	70,74 %	0,00	32.918.632,00		
11-1401-1-022604		PEMUTIHAN IZIN	100.000.000,00	872.200,00	37.635.800,00	39.768.000,00	39,72 %	0,00	61.232.000,00		
11-1401-1-022605		IZIN PEMUTIHAN IZIN	1.500.000,00	7.300,00	432.300,00	440.000,00	29,33 %	0,00	1.060.000,00		
11-1401-1-022606		REK. BEA BILIK NAMA IZIN	5.000.000,00	134.115,00	10.214.379,00	10.349.094,00	206,58 %	0,00	5.349.094,00		
11-1401-1-022607		SEKOR IZIN	350.000.000,00	29.095.035,00	898.170.728,00	890.172.765,00	259,62 %	0,00	540.173.765,00		
115-11-0109-1-0228		REK. IZIN GANGSIAN	600.000.000,00	37.350.000,00	553.175.000,00	591.125.000,00	98,52 %	0,00	8.875.000,00		
116-11-1401-1-0229		REK. IZIN TRAYEK	8.300.000,00	2.150.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	91,69 %	0,00	690.000,00		
11-1401-1-022901		IZIN TRAYEK	7.200.000,00	2.150.000,00	4.866.000,00	7.010.000,00	97,26 %	0,00	190.000,00		
11-1401-1-022902		IZIN USH ANGGARAN	1.100.000,00	0,00	606.000,00	600.000,00	54,55 %	0,00	500.000,00		
117-11-2101-1-0231		REK. IZIN UTUK PENJUALAN TAHAN	3.100.000.000,00	358.691.292,00	3.243.803.690,00	3.602.494.918,00	116,21 %	0,00	502.494.918,00		
11-2101-1-023101		BPPO	3.100.000.000,00	358.691.292,00	3.243.803.690,00	3.602.494.918,00	116,21 %	0,00	502.494.918,00		
11-2101-1-023102		ISRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
118-11-1401-1-0232		IZIN	23.000.000,00	2.580.000,00	42.750.000,00	45.250.000,00	196,74 %	0,00	22.250.000,00		
119-11-2601-1-0233		IZIN USHARA PERDAGANGAN	70.000.000,00	8.650.000,00	83.665.000,00	92.515.000,00	132,16 %	0,00	22.515.000,00		
120-11-0801-1-0234		IZIN USHARA INDUSTRI	9.100.000,00	825.000,00	2.725.000,00	9.530.000,00	104,75 %	0,00	430.000,00		
121-11-0902-1-0235		REK. PELATIHAN BLK	60.000.000,00	4.800.000,00	55.180.000,00	59.990.000,00	99,99 %	0,00	4.000,00		
122-11-1401-1-02		REK. TOWER	981.000.000,00	41.850.000,00	1.517.415.650,00	1.559.095.650,00	155,83 %	0,00	578.095.650,00		
11-1401-1-02		IZIN PENYOWHAN TOWER	600.000.000,00	41.850.000,00	1.183.203.150,00	1.225.053.150,00	204,18 %	0,00	625.053.150,00		
11-1401-1-02		SEKOR IZIN TOWER	381.000.000,00	0,00	334.042.500,00	334.042.500,00	87,48 %	0,00	46.957.500,00		
		JUMLAH	33.405.992.000,00	2.869.349.239,00	31.994.787.477,00	34.865.136.716,00	104,26 %	0,00	1.477.144.716,00		
11-11-0105-1-0301		LABOR BANGUN LABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
11-0105-1-030101		LABORAN LABA PERSIHLK DOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
11-0105-1-030102		LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
11-0105-1-030103		LABOR LABA LEMBAGA KEUANGAN BHA	3.360.375.800,00	205.265.582,00	4.024.964.926,65	5.036.230.489,65	149,69 %	0,00	1.469.854.089,65		
11-0105-1-030104		LABOR	2.556.374.200,00	0,00	4.024.964.926,65	4.024.964.926,65	157,45 %	0,00	1.468.590.726,65		

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BUKUH PEROLEHAN KEUANGAN DAN KEMAYAN DEWAH
LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DEWAH
 Bulan : Desember Tahun : 2007

Igl. Pros : 23-01-2008
 Jm : 07:31:23
 Halaman : 1

No. Rekening	Jenis Pekerjaan	Anggaran	Bulan Ini	Realisasi Pekerjaan		Sisa Lebih	Sisa Kurang	Bekas
				s/d Bulan Sebelumnya	s/d Bulan Ini			
1	POS PAJAK	10.000.000.000,00	888.666.486,61	10.534.955.932,24	11.423.626.418,85	1.423.626.418,85	0,00	0,00
2	PAJAK HOTEL	4.300.000.000,00	563.091.522,79	4.937.302.039,12	5.220.585.571,82	870.583.571,82	0,00	0,00
3	PAJAK RESTORAN	4.300.000.000,00	109.859.140,00	1.978.318.537,33	2.035.377.677,33	535.377.677,33	0,00	0,00
4	PAJAK BESI/BAH	4.300.000.000,00	328.201.740,34	4.403.715.741,27	4.849.917.481,91	249.917.481,91	0,00	0,00
5	PAJAK PEKERJAAN JALAN	20.500.000.000,00	3.195.845.115,66	22.510.482.312,00	25.785.707.427,00	5.285.707.427,00	0,00	0,00
6	PAJAK PANGAS	600.000.000,00	91.074.750,00	582.019.225,00	633.091.975,00	33.091.975,00	0,00	0,00
7	PAJAK PABRIK	600.000.000,00	28.007.400,00	390.837.700,00	419.445.189,00	19.445.189,00	0,00	0,00
JUMLAH								
1	POS RETRIBUSI	42.000.000.000,00	5.007.136.164,85	45.285.393.587,06	50.297.665.731,91	8.287.665.731,91	0,00	0,00
1	RET. PEL. KESEHATAN DIMKES	6.666.000.000,00	1.247.082.630,00	5.818.171.865,00	7.065.264.489,00	1.247.082.630,00	0,00	0,00
2	RET. PEL. KESEHATAN ESUD	17.400.000.000,00	1.471.877.477,40	16.063.117.986,40	17.500.935.475,00	1.427.857.488,60	0,00	0,00
3	RET. PEL. PERSAMPARAN/KEBERSIHAN	775.000.000,00	33.919.455,40	728.084.540,60	666.455.200,00	108.544.890,60	0,00	0,00
4	RET. SAMPAH PERUMAHAN	285.000.000,00	16.678.160,00	271.321.840,00	288.385.150,00	16.678.160,00	0,00	0,00
5	RET. SAMPAH PABRIK/RM/WTL	270.000.000,00	11.574.750,00	264.425.250,00	273.979.150,00	13.554.900,00	0,00	0,00
6	RET. CETAK & T P	220.000.000,00	40.395.000,00	179.605.000,00	219.990.000,00	40.395.000,00	0,00	0,00
7	RET. CETAK ANTE CAPTL	250.000.000,00	20.046.000,00	230.000.000,00	246.734.000,00	16.734.000,00	0,00	0,00
8	RET. PABRIK JALAN UMUM	275.000.000,00	43.488.500,00	231.511.500,00	246.386.100,00	14.875.400,00	0,00	0,00
9	RET. PABRIK	2.300.000.000,00	227.655.400,00	2.072.344.600,00	2.245.103.200,00	827.141.400,00	0,00	0,00
10	RET. PANGAS	860.000.000,00	71.411.500,00	788.588.500,00	852.556.225,00	36.032.275,00	0,00	0,00
11	RET. PANGAS KENDARAAN MOTOR	4.400.000,00	747.000,00	8.910.500,00	9.657.500,00	747.000,00	0,00	0,00
12	RET. PANGAS PEN. KEAYAHAN DEWAH	23.268.600,00	5.765.400,00	17.787.400,00	21.552.800,00	3.765.400,00	0,00	0,00
13	RET. PANGAS KALUWANG	125.550.000,00	32.279.459,00	92.186.364,00	124.115.823,00	31.936.459,00	0,00	0,00
14	RET. PANGAS TIDUR/PITRI	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00
15	RET. SEMA ALAT BESAT	83.000.000,00	4.770.000,00	79.588.000,00	84.358.800,00	4.770.000,00	0,00	0,00
16	RET. SEMA ALAT LABORAT	17.000.000,00	5.077.500,00	12.000.000,00	17.000.000,00	5.077.500,00	0,00	0,00
17	RET. SEMA GEDUNG	15.000.000,00	2.600.000,00	12.400.000,00	14.787.500,00	2.387.500,00	0,00	0,00
18	RET. SEMA LAMPANGAN DEKORANSI	0,00	75.600,00	831.600,00	61.975.000,00	41.904.400,00	0,00	0,00
19	RET. SEMA BUIS	202.086.000,00	15.954.000,00	177.622.500,00	193.576.600,00	15.954.000,00	0,00	0,00
20	RET. SEMA USUHA TERMINAL	173.286.000,00	8.894.000,00	164.392.000,00	164.316.600,00	75.392.000,00	0,00	0,00
21	RET. SEMA TERMINAL	20.400.000,00	3.600.000,00	17.000.000,00	20.760.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
22	RET. SEMA TERMINAL JOMBOR	8.400.000,00	3.600.000,00	4.900.000,00	8.500.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
23	RET. SEMA USUHA R. PING HEMAN	53.000.000,00	6.848.500,00	45.223.907,00	52.072.407,00	6.848.500,00	0,00	0,00
24	RET. SEMA USUHA R. PING HEMAN	524.302.560,00	47.759.780,00	476.542.780,00	488.299.103,00	111.600,00	0,00	0,00
25	RET. SEMA USUHA R. PING HEMAN	426.602.560,00	38.111.280,00	410.423.823,00	448.535.103,00	111.600,00	0,00	0,00
26	RET. SEMA USUHA R. PING HEMAN	22.700.000,00	90.000,00	42.495.000,00	42.585.000,00	90.000,00	0,00	0,00
27	RET. SEMA USUHA R. PING HEMAN	75.000.000,00	9.558.500,00	108.150.500,00	117.799.000,00	157.000,00	0,00	0,00

PEKERJAAN LARIPATER SLEMAK
 BIDANG PENGUCILAN TEKNIKUM DAN ALKOTAN DREHAR
 LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DREHAR
 Bulan : Desember Tahun : 2007

Igl. Prs : 23-01-2008
 Jam : 07:35:25
 Halaman : 2

No. rekening	Jenis Pemakaian	Anggaran	Realisasi Pemakaian		s/d Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya	Sisa Kurang	Sisa Lebih	Netraangan
			Bulan Ini	s/d Bulan Sebelumnya					
13	RET. PEKERJAAN PAD DREHAR	212.500.000,00	10.378.800,00	102.175.700,00	181.554.500,00	85,00 %	39.945.500,00	0,00	
-110201022501	RET. PEKERJAAN BENIH IGAR	50.000.000,00	29.804.800,00	46.453.000,00	76.257.800,00	153,00 %	9.100.000,00	28.259.800,00	
-110201022502	RET. PEKERJAAN NSL TRAK BPP	105.000.000,00	45.714.000,00	59.126.800,00	75.900.000,00	71,00 %	9.100.000,00	0,00	
-110201022503	RET. PEKERJAAN NSL KEDIRI SANGKUN	2.500.000,00	2.100.000,00	3.458.000,00	2.300.000,00	92,00 %	0,00	0,00	
-110201022504	RET. PEKERJAAN SPALIT	45.000.000,00	0,00	3.458.000,00	3.668.000,00	8,00 %	42.331.000,00	0,00	
-110201022505	RET. PEKERJAAN SUMBAR BETON	9.000.000,00	700.000,00	2.778.400,00	3.426.400,00	38,00 %	5.325.600,00	0,00	
14	RET. IZIN	2.261.500.000,00	210.736.242,00	1.052.870.402,00	1.263.426.644,00	55,00 %	997.893.292,00	0,00	
-110401022601	RET. IZIN	2.261.500.000,00	210.736.242,00	1.052.870.402,00	1.263.426.644,00	55,00 %	997.893.292,00	0,00	
-110401022602	RET. PERLITIAN IZIN	100.000.000,00	195.834.147,00	859.621.075,00	1.150.527.224,00	36,00 %	901.462.779,00	0,00	
-110401022603	PENYIWAHAN IZIN	102.500.000,00	9.799.955,00	47.809.639,00	57.609.594,00	36,00 %	42.392.425,00	0,00	
-110401022604	BUMI PENYIWAHAN IZIN	1.500.000,00	4.104.740,00	42.538.725,00	46.643.724,00	31,00 %	1.152.260,00	0,00	
-110401022605	RET. BEA BALK MARR IZIN	7.500.000,00	574.920,00	9.571.026,00	10.095.946,00	133,00 %	2.595.916,00	0,00	
15	RET. IZIN GARGESAN	575.000.000,00	34.329.000,00	630.405.000,00	664.325.000,00	114,00 %	0,00	89.253.000,00	
-1109010228	RET. IZIN GARGESAN	575.000.000,00	34.329.000,00	630.405.000,00	664.325.000,00	114,00 %	0,00	89.253.000,00	
-1109010229	IZIN TRAYEK	7.010.000,00	6,00	7.039.000,00	7.039.000,00	100,00 %	0,00	320.000,00	
-110901022901	IZIN USH ANSUJARAN	600.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	150,00 %	0,00	300.000,00	
-110901022902	RET. IZIN UTUK PENGUMAHAN TANAH	3.250.000.000,00	361.038.340,00	2.935.417.274,00	3.256.450.564,00	101,00 %	0,00	46.453.564,00	
-1109010231	IZIN USH	13.000.000,00	150.000,00	23.458.000,00	23.608.000,00	182,00 %	0,00	10.645.500,00	
-1109010233	IZIN USHAR PENGUMAHAN	77.000.000,00	7.145.000,00	105.568.000,00	110.735.000,00	144,00 %	0,00	33.795.000,00	
-1109010235	TANDA DAPAT INDUSTRI	10.600.000,00	1.450.000,00	12.015.000,00	13.525.000,00	128,00 %	0,00	2.925.000,00	
-11090210224	RET. PELITIHAN BLK	60.000.000,00	0,00	59.974.000,00	59.974.000,00	100,00 %	0,00	0,00	
-11090210225	RET. TOMEK	2.000.000.000,00	120.000.000,00	1.758.125.000,00	1.878.125.000,00	94,00 %	121.875.000,00	0,00	
-1120024(L)	RET. IZIN PRANUNISARSA	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	100,00 %	0,00	0,00	
-1120025(L)	RET. PISAR KEMHY GAMPING	72.000.000,00	8.590.000,00	86.796.000,00	91.886.000,00	126,00 %	0,00	22.886.000,00	
	Jumlah	58.949.207.150,00	4.103.612.598,00	35.261.649.320,00	39.265.252.108,00	93,00 %	416.054.948,00	0,00	
1	PIS BACTAN LABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
-11010510301	BAGIAN LABA PISAR BLK DREH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
2	BAG LABA LEBIHAR KEDIRI BAKI	5.332.495.490,00	532.492.490,00	5.166.447.640,10	5.698.941.120,18	103,00 %	0,00	166.445.680,18	
-11010510302	BAG LABA LEBIHAR KEDIRI BAKI	5.332.495.490,00	532.492.490,00	5.166.447.640,10	5.698.941.120,18	103,00 %	0,00	166.445.680,18	
3	BAG LABA LEBIHAR KEDIRI BAKI	1.032.493.490,00	532.493.490,00	500.000.000,00	4.666.447.640,18	45,00 %	2.008,00	0,00	
-11010510302	BAG LABA LEBIHAR KEDIRI BAKI	1.032.493.490,00	532.493.490,00	500.000.000,00	4.666.447.640,18	45,00 %	2.008,00	0,00	
-11010510303	BAG LABA LEBIHAR KEDIRI BAKI	101.828.250,00	5.000.000,00	118.356.500,00	123.856.500,00	121,00 %	0,00	21.528.250,00	
-1101051030301	BAG LABA LEBIHAR KEDIRI BAKI	101.828.250,00	5.000.000,00	118.356.500,00	123.856.500,00	121,00 %	0,00	21.528.250,00	
-112003(L)	LABA KE2KS	90.000.000,00	5.000.000,00	85.000.000,00	90.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	
	Jumlah	5.624.323.740,00	537.493.490,00	5.284.004.140,18	5.822.371.630,18	103,00 %	0,00	187.913.880,18	
1	LAINNYA PERSEKUTUAN ABRI BAKI	77.012.000,00	2.311.888.300,00	327.702.000,00	2.639.590.300,00	341,00 %	0,00	2.562.578.500,00	
-11010310401	PERSEKUTUAN RUMAH DIMAS	77.012.000,00	2.311.888.300,00	327.702.000,00	2.639.590.300,00	341,00 %	0,00	2.562.578.500,00	
-1101031040101	PERSEKUTUAN RUMAH DIMAS	77.012.000,00	2.311.888.300,00	327.702.000,00	2.639.590.300,00	341,00 %	0,00	2.562.578.500,00	

PERUSAHAAN KARYAHEN S. GUN
 DINAS PERENCANAAN KEMUDAHAN DAN REKREASIS
 LAPORAN REALISASI PERENCANAAN BAHAN
 Bulan Desember Tahun 2010

Jml. Prns : 09-02-2010
 Jam : 13:56:34
 Halaman : 1

No. / Rekening	Uraian Perkiraan	Realisasi Perkiraan		Sisa Anggaran	Sisa Mkrang	Sisa Leth	Keterangan
		Bulan Ini	%/ Bulan Sebelumnya				
1	000 PALAK	17.500.000,00	15.527.271,00	18.000.000,00	146,00	5.889.824,24	0,00
2	000 PALAK HOTEL	6.000.000,00	5.634.000,00	6.000.000,00	127,00	1.638.940,53	0,00
3	000 PALAK RESIDEN	2.000.000,00	1.878.225,00	2.000.000,00	144,00	1.037.588,41	0,00
4	000 PALAK RESTORAN	6.800.000,00	6.014.841,00	7.000.000,00	133,00	2.220.869,14	0,00
5	000 PALAK RESTORAN JALAN	27.000.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00	115,00	3.990.111,89	0,00
6	000 PALAK RESTORAN JALAN	600.000,00	578.000,00	600.000,00	102,00	12.441.593,00	0,00
7	000 PALAK RESTORAN	150.000,00	142.000,00	150.000,00	121,00	125.884.059,00	0,00
JMLAH		58.500.000,00	53.775.825,42	64.600.000,00	126,00	14.694.731.051,16	
1	000 BERTUKAR	30.750.000,00	28.475.000,00	30.000.000,00	92,00	2.551.230,57	0,00
2	000 BELANJAWAN KESKIDAN	8.250.000,00	7.517.833,00	8.500.000,00	88,00	265,75	0,00
3	000 BELANJAWAN KESKIDAN	2.500.000,00	2.315.000,00	2.500.000,00	93,00	2.701.958,80	0,00
4	000 BELANJAWAN KESKIDAN	700.000,00	650.000,00	700.000,00	93,00	0,00	0,00
5	000 BELANJAWAN KESKIDAN	400.000,00	360.000,00	400.000,00	90,00	117.184.000,00	0,00
6	000 BELANJAWAN KESKIDAN	200.000,00	180.000,00	200.000,00	90,00	86.388.400,00	0,00
7	000 BELANJAWAN KESKIDAN	572.500,00	520.000,00	572.500,00	91,00	30.885.700,00	0,00
8	000 BELANJAWAN KESKIDAN	375.500,00	340.000,00	375.500,00	91,00	10.000.000,00	0,00
9	000 BELANJAWAN KESKIDAN	340.000,00	310.000,00	340.000,00	91,00	61.200.700,00	0,00
10	000 BELANJAWAN KESKIDAN	200.000,00	180.000,00	200.000,00	90,00	28.088.050,00	0,00
11	000 BELANJAWAN KESKIDAN	150.000,00	135.000,00	150.000,00	90,00	32.819.000,00	0,00
12	000 BELANJAWAN KESKIDAN	3.400.000,00	3.120.000,00	3.400.000,00	92,00	54.291.000,00	0,00
13	000 BELANJAWAN KESKIDAN	28.000,00	26.000,00	28.000,00	93,00	4.655.700,00	0,00
14	000 BELANJAWAN KESKIDAN	9.000.000,00	8.100.000,00	9.000.000,00	90,00	11.900.000,00	0,00
15	000 BELANJAWAN KESKIDAN	7.000.000,00	6.300.000,00	7.000.000,00	90,00	37.800,00	0,00
16	000 BELANJAWAN KESKIDAN	64.250.000,00	58.000,00	64.250.000,00	0,00	27.702.900,00	0,00
17	000 BELANJAWAN KESKIDAN	18.250.000,00	16.500,00	18.250.000,00	0,00	260.000,00	0,00
18	000 BELANJAWAN KESKIDAN	15.000.000,00	13.500,00	15.000.000,00	0,00	699.000,00	0,00
19	000 BELANJAWAN KESKIDAN	30.000,00	27.000,00	30.000,00	90,00	198.782.000,00	0,00
20	000 BELANJAWAN KESKIDAN	30.000,00	27.000,00	30.000,00	90,00	31.235.000,00	0,00
21	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
22	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
23	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
24	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
25	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
26	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
27	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
28	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
29	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
30	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
31	000 BELANJAWAN KESKIDAN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00
JMLAH		1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	90,00	14.600.000,00	0,00

KEMENTERIAN KEHUTAN DAN PERUMAHAN
DINAS PERENCANAAN, KEBUDAHUSAIAN, PERTANIAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERINDUSTRIAN
Bulan Desember Tahun 2010

Tgl. Penc. 06-02-2010
Jus 13.55.36
Halaman 2

No. Rekening	Jenis Pemasalahan	Kategori	Realisasi Pemasalahan		%	Sisa Barang	Sisa Lebih	Mekawagan
			Bulan Ini	9/12 Bulan Sebelumnya				
112002.01	RET. PERAT. PENKESNI & OR	1.131.478.474,00	253.969.550,00	1.802.778.510,00	132,00 %	0,00	925.209.648,00	
112002.02	RET. P. R. H	10.225.000,00	5.100.000,00	13.185.000,00	120,00 %	0,00	148.000,00	
112002.03	RET. PERUB. SERT	37.469.500,00	0,00	37.469.500,00	100,00 %	0,00	0,00	
112002.04	RET. IZIN PERMANGSATA	8.009.000,00	400.000,00	7.609.000,00	95,00 %	0,00	0,00	
112003.01	RET. PERALAMAN PRO. BAKAR	121.115.650,00	60.568.300,00	115.007.500,00	95,00 %	0,00	8.460.150,00	
112003.02	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	55.000.000,00	32.068.250,00	41.931.750,00	76,00 %	0,00	27.321.250,00	
112003.03	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN PPK	05.000.000,00	24.000.000,00	64.345.000,00	128,00 %	16.537.250,00	0,00	
112003.04	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN PPK	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	40,00 %	0,00	0,00	
112003.05	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN PPK	4.139.000,00	2.801.000,00	1.219.000,00	29,00 %	0,00	0,00	
112004.01	RET. IZIN MERUBAHKAN BAHAN	2.000.000,00	552.016.506,00	4.802.765.028,00	240,00 %	2.206.850,00	0,00	
112004.02	RET. IZIN MERUBAHKAN BAHAN	2.000.000,00	145.113.350,00	1.474.213.815,90	73,00 %	0,00	2.783.381.534,05	
112004.03	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	100.000.000,00	7.317.350,00	53.788.615,50	53,00 %	30.654.814,10	0,00	
112004.04	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	119.000.000,00	3.761.950,00	53.788.615,50	45,00 %	36.556.182,50	0,00	
112004.05	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	1.500.000,00	30.000,00	267.500,00	18,00 %	1.232.500,00	0,00	
112004.06	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	10.000.000,00	1.943.340,00	26.845.730,00	268,00 %	0,00	18.388.670,00	
112004.07	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	472.500.000,00	194.631.965,00	1.519.822.786,25	322,00 %	0,00	3.385.854.782,25	
112004.08	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	650.000.000,00	18.653.000,00	778.279.000,00	120,00 %	0,00	156.882.000,00	
112004.09	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	7.560.000,00	609.000,00	8.815.000,00	117,00 %	0,00	1.015.000,00	
112004.10	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	6.886.000,00	409.000,00	6.675.000,00	97,00 %	0,00	15.000,00	
112004.11	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	1.000.000,00	659.877.200,00	6.536.543.033,45	654,00 %	0,00	1.624.000,00	
112004.12	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	4.750.000.000,00	659.877.200,00	6.536.543.033,45	14,00 %	0,00	2.488.460.873,45	
112004.13	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	1.000.000,00	0,00	500.000,00	50,00 %	500.000,00	0,00	
112004.14	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	13.800.000,00	1.700.000,00	48.300.000,00	349,00 %	0,00	36.900.000,00	
112004.15	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	8.100.000,00	3.818.000,00	110.515.000,00	1365,00 %	0,00	27.155.000,00	
112004.16	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	5.100.000,00	425.000,00	12.200.000,00	240,00 %	0,00	3.225.000,00	
112004.17	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	60.000.000,00	0,00	43.411.873,06	72,00 %	36.588.000,00	0,00	
112004.18	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	2.000.000.000,00	150.000.000,00	2.886.437.500,00	144,00 %	0,00	1.016.437.500,00	
112004.19	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	100.000.000,00	13.410.250,00	115.841.350,00	116,00 %	0,00	23.558.000,00	
112004.20	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	1.136.500,00	1.136.500,00	2.859.500,00	252,00 %	0,00	3.799.000,00	
112004.21	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	88.400.000,00	0,00	34.250.000,00	39,00 %	34.150.000,00	0,00	
112004.22	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	49.851.206.825,90	4.880.131.730,00	49.851.206.825,90	100,00 %	0,00	5.182.844.875,90	
112004.23	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
112004.24	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
112004.25	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	9.818.600.825,90	0,00	9.818.600.825,90	100,00 %	0,00	22,00	
112004.26	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	7.778.101.377,90	0,00	7.778.101.377,90	100,00 %	0,00	0,00	
112004.27	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	2.040.435.465,00	0,00	2.040.435.465,00	100,00 %	0,00	27,00	
112004.28	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	21.000.000,00	0,00	151.923.649,93	723,00 %	0,00	133.923.649,93	
112004.29	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	21.000.000,00	0,00	151.923.649,93	723,00 %	0,00	133.923.649,93	
112004.30	RET. PERALAMAN BERTH. PLAN	21.000.000,00	0,00	151.923.649,93	723,00 %	0,00	133.923.649,93	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
 Alamat : Jl. Pangsapua No.05 Beroan, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telephone (0274) 867248, 868465 Psw 1327, Fax (0274) 868474 Kode Pos 55511

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2010

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET STL	REALISASI PENERIMAAN			%	KET
			PERUBAHAN (Rp)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 20 1 20 07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH						
A	4 1 01	PAJAK DAERAH	21.326.096.600,00	21.576.664.548,17	897.176.396,97	22.473.840.945,14	105,38	1.147.744.345,14
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	8.668.000.000,00	9.492.876.219,18	702.212.507,70	10.195.038.726,88	117,62	1.527.038.726,88
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.596.849.854,95	189.632.521,90	3.786.482.376,85	108,19	286.482.376,85
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	8.600.000.000,00	7.109.762.537,95	1.956.841.913,70	9.066.604.451,65	105,43	466.604.451,65
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	32.500.000.000,00	30.221.147.276,00	3.398.243.070,00	33.619.390.346,00	103,44	1.119.390.346,00
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	650.000.000,00	386.402.805,00	313.574.850,00	699.977.655,00	107,69	49.977.655,00
	4 1 01 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)	725.000.000,00	704.867.318,00	65.341.136,00	770.208.454,00	106,24	45.208.454,00
	4 1 01 07	7. Pajak Parkir						
		Jumlah A	75.969.096.600,00	73.088.520.559,25	7.521.022.396,27	80.611.542.955,52	106,11	4.642.446.355,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	1 03	1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN						
A			RETRIBUSI DAERAH						
4	1 2 01 02	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00	852.768.450,00	52.826.850,00	905.595.300,00	113,20	105.595.300,00	
4	1 2 01 02	a. Perumahan, Depo	480.000.000,00	493.849.500,00	30.008.000,00	523.857.500,00	109,14	43.857.500,00	
4	1 2 01 02	b. Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	320.000.000,00	358.918.950,00	22.818.850,00	381.737.800,00	119,29	61.737.800,00	
4	1 2 01 02	c. Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1 2 01 04	2. Pelayanan Pemakaman	68.400.000,00	66.880.000,00	1.350.000,00	68.230.000,00	99,75	(170.000,00)	
4	1 2 02 01	3. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	752.671.000,00	954.863.500,00	64.251.000,00	1.019.114.500,00	135,40	266.443.500,00	
4	1 2 01 01	a. Sewa Alat Laborat	10.717.000,00	10.717.000,00	661.000,00	10.873.000,00	106,90	702.000,00	
4	1 2 01 01	b. Sewa Alat-alat Berat	80.500.000,00	86.485.000,00	10.340.000,00	96.825.000,00	104,68	4.325.000,00	
4	1 2 01 01	* Stoom Walls & Vibro	80.500.000,00	86.485.000,00	10.340.000,00	96.825.000,00	104,68	4.325.000,00	
4	1 2 01 01	* Flat Bed Truck	12.000.000,00	78.575.000,00	9.220.000,00	87.795.000,00	109,06	7.295.000,00	
4	1 2 01 01	* Wheel Loader	0,00	3.360.000,00	1.720.000,00	4.480.000,00	37,33	7.320.000,00	
4	1 2 01 01	* Dump Truck	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	#DIV/0!	3.800.000,00	
4	1 2 02 13	c. Sewa Rusunawa	650.000.000,00	858.166.500,00	53.250.000,00	911.416.500,00	140,22	261.416.500,00	
4	1 2 2 13	4. Jasa Usaha Produk Daerah	2.128.000,00	758.850,00	0,00	758.850,00	35,66	(1.369.150,00)	
4	1 2 2 13	a. Penjualan Split	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
4	1 2 2 13	b. Penjualan Sumuran Beton	2.128.000,00	758.850,00	0,00	758.850,00	35,66	(1.369.150,00)	
4	1 2 03 01	c. Penjualan Beton pracetak	3.400.000.000,00	3.579.679.364,25	1.266.500.850,00	4.846.180.214,25	142,53	1.446.180.214,25	
4	1 2 3 01	5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.681.000.000,00	1.143.381.985,00	883.444.410,00	2.026.826.395,00	75,60	(654.173.605,00)	
4	1 2 3 01	a. IMB	1.131.000.000,00	499.173.148,00	42.804.940,00	541.978.088,00	47,92	(589.021.912,00)	
4	1 2 3 01	* Perancangan/masyarakat	1.131.000.000,00	499.173.148,00	42.804.940,00	541.978.088,00	47,92	(589.021.912,00)	
4	1 2 3 01	* Real Estate/Pabrik/Swasta	1.550.000.000,00	403.794.667,00	8.853.470,00	412.648.137,00	26,62	(1.137.351.863,00)	
4	1 2 3 01	* Bangunan Pemerintah	0,00	240.414.170,00	831.786.000,00	1.072.200.170,00	#DIV/0!	1.072.200.170,00	
4	1 2 3 01	b. Penelitian IMB	129.000.000,00	49.707.320,25	51.339.810,00	101.047.130,25	78,33	(27.952.869,75)	
4	1 2 3 01	c. Pemukiman IMB	100.000.000,00	28.806.638,00	2.934.200,00	31.740.838,00	31,74	(68.259.162,00)	
4	1 2 3 01	d. Administrasi Pemukiman IMB	1.500.000,00	202.500,00	10.000,00	212.500,00	14,17	(1.287.500,00)	
4	1 2 3 01	e. Bea Balik nama IMB	10.000.000,00	19.553.561,00	1.271.390,00	20.824.951,00	208,25	10.824.951,00	
4	1 2 3 01	f. Denda Retribusi :	478.500.000,00	2.338.027.360,00	327.501.040,00	2.665.528.400,00	557,06	2.187.028.400,00	
4	1 4 08 03	* IMB	478.500.000,00	2.338.027.360,00	327.501.040,00	2.665.528.400,00	557,06	2.187.028.400,00	
4	1 4 08 03	* RTBL	0,00	514.636.959,00	24.366.230,00	539.003.189,00	112,64	60.503.189,00	
4	1 4 08 03	* Site plan (Ijin Makam dll)	0,00	1.205.611.889,00	189.281.030,00	1.394.892.919,00	#DIV/0!	1.394.892.919,00	
4	1 2 03 07	6. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	13.000.000,00	617.778.512,00	113.853.780,00	731.632.292,00	#DIV/0!	731.632.292,00	
4	1 2 03 13	7. Ijin Pendirian Tower/Denda Tower	3.000.000.000,00	22.700.000,00	1.200.000,00	23.900.000,00	183,85	10.900.000,00	
4	1 2 03 13	Jumlah 5A	8.036.199.000,00	7.158.900.164,25	1.386.128.700,00	8.545.028.864,25	106,33	(1.318.750.000,00)	
B		LAIN-LAIN PAD							
4	1 4 01	1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan	73.749.000,00	49.296.000,00	5.746.000,00	55.042.000,00	74,63	(18.707.000,00)	
4	1 4 01 07	a. Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan	73.749.000,00	49.296.000,00	5.746.000,00	55.042.000,00	74,63	(18.707.000,00)	
		Jumlah 5B	8.109.948.000,00	7.208.196.164,25	1.391.874.700,00	8.600.070.864,25	106,04	(490.122.864,25)	
		Jumlah 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	2 06	1 15 01	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI						
	4 1	2 02	A RETRIBUSI						
			1. Bidang Perdagangan						
			a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)						
			88.190.000,00	130.935.000,00	9.895.000,00	140.830.000,00	159,69	52.640.000,00	
			57.750.000,00	93.785.000,00	6.750.000,00	100.535.000,00	174,09	42.785.000,00	
			29.840.000,00	36.500.000,00	2.845.000,00	39.345.000,00	131,85	9.505.000,00	
			600.000,00	650.000,00	300.000,00	950.000,00	158,33	350.000,00	
	4 1	2 03	2. Bidang Perindustrian						
			9.100.000,00	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	122,53	2.050.000,00	
			4.600.000,00	8.100.000,00	1.150.000,00	9.250.000,00	201,09	4.650.000,00	
			4.500.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	42,22	(2.600.000,00)	
			97.290.000,00	140.935.000,00	11.045.000,00	151.980.000,00	156,21	54.690.000,00	
			B Lain-lain PAD						
	4 1	3 14	Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal						
			332.782.205,00	403.219.350,00	16.255.000,00	419.474.350,00	126,05	86.692.145,00	
			61.582.205,00	72.726.000,00	3.405.000,00	76.131.000,00	123,62	14.548.795,00	
			271.200.000,00	330.493.350,00	12.850.000,00	343.343.350,00	126,60	72.143.350,00	
			332.782.205,00	403.219.350,00	16.255.000,00	419.474.350,00	126,05	86.692.145,00	
			430.072.205,00	544.154.350,00	27.300.000,00	571.454.350,00	132,87	141.382.145,00	
12	2 04	1 17 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
			RETRIBUSI						
	4 1	2 02 01	1. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah						
			54.044.200,00	59.065.000,00	0,00	59.065.000,00	109,29	5.020.800,00	
			27.400.000,00	33.080.200,00	0,00	33.080.200,00	120,73	5.680.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
			26.644.200,00	25.984.800,00	0,00	25.984.800,00	97,53	(659.400,00)	
	4 1	2 02 10	2. Jasa usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga						
			111.876.200,00	261.936.150,00	13.102.600,00	275.038.750,00	245,84	163.162.550,00	
			72.633.900,00	152.784.600,00	10.066.800,00	162.851.400,00	224,21	90.217.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
			7.533.900,00	10.408.800,00	1.318.800,00	11.727.600,00	155,66	4.193.700,00	
			15.600.000,00	27.748.800,00	0,00	27.748.800,00	177,88	12.148.800,00	
			49.500.000,00	114.627.000,00	8.748.000,00	123.375.000,00	249,24	73.875.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
	4 1	2 02 10	b. Pentas Seni						
			12.150.000,00	22.055.000,00	105.000,00	22.160.000,00	182,39	10.010.000,00	
	4 1	2 02 10	c. SIUK/RHU						
			27.092.300,00	87.096.550,00	2.930.800,00	90.027.350,00	332,30	62.935.050,00	
			9.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00	44,44	(5.000.000,00)	
	4 1	2 03 01	3. Perizinan Pramuwisata						
			174.920.400,00	321.801.150,00	16.302.600,00	338.103.750,00	193,29	163.183.350,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	4 1 1 19 02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	4 1 2 03 03	- Retribusi Ijin Gangguan	700.000.000,00	744.080.000,00	68.635.000,00	812.715.000,00	116,10	112.715.000,00
		Jumlah 13	700.000.000,00	744.080.000,00	68.635.000,00	812.715.000,00	116,10	112.715.000,00
14	1 20 1 20 03	SEKRETARIAT DAERAH						
	4 1 2 02 01	A. RETRIBUSI	98.500.000,00	109.589.000,00	1.545.000,00	111.134.000,00	112,83	12.634.000,00
	4 1 2 02 01	1. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Bag. Umum)	63.250.000,00	58.389.000,00	745.000,00	59.134.000,00	93,49	(4.116.000,00)
		- Wisma Sembada	30.000.000,00	23.265.000,00	0,00	23.265.000,00	77,55	(6.735.000,00)
		- Gd. Serba Guna	12.000.000,00	10.600.000,00	550.000,00	11.150.000,00	92,92	(850.000,00)
		- Gd. Kesenian	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	#DIV/0!	150.000,00
		- Gd. Olah Raga	20.000.000,00	22.449.000,00	195.000,00	22.644.000,00	113,22	2.644.000,00
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	1.250.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	154,00	675.000,00
	4 1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	19.250.000,00	29.650.000,00	0,00	29.650.000,00	154,03	10.400.000,00
	4 1 2 02 01	c. Sewa Bus	16.000.000,00	21.550.000,00	800.000,00	22.350.000,00	139,69	6.350.000,00
	4 1 3 01	2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pershpn. Milik Daerah	21.000.000,00	275.202.761,70	0,00	275.202.761,70	1.310,49	254.202.761,70
	4 1 3 01 03	- BLUKP	21.000.000,00	275.202.761,70	0,00	275.202.761,70	1.310,49	254.202.761,70
		Jumlah 14	119.500.000,00	384.791.761,70	1.545.000,00	386.336.761,70	323,29	266.836.761,70
15	1 20 1 20 08	DINAS PASAR						
	4 1 2 01 01	RETRIBUSI	3.212.125.200,00	2.981.159.050,00	291.405.500,00	3.272.564.550,00	101,88	60.439.350,00
	4 1 2 01 01	1. Pelayanan Pasar :	2.621.086.800,00	2.342.334.800,00	220.772.600,00	2.563.107.400,00	97,79	(57.979.400,00)
	4 1 2 01 01	a. Retribusi Pasar	190.067.800,00	243.942.250,00	36.222.000,00	280.164.250,00	147,40	90.096.450,00
	4 1 2 01 01	b. Ijin Los, Kios dan Bango	83.300.000,00	73.892.000,00	6.777.000,00	80.669.000,00	96,84	(2.631.000,00)
	4 1 2 01 01	c. MCK	84.287.300,00	74.860.200,00	6.939.000,00	81.799.200,00	97,05	(2.488.100,00)
	4 1 2 01 01	d. Lerepan	0,00	27.453.000,00	0,00	27.453.000,00	#DIV/0!	27.453.000,00
	4 1 2 01 01	e. Parkir	233.383.300,00	218.676.800,00	20.694.900,00	239.371.700,00	102,57	5.988.400,00
	4 1 2 02 01	f. Sampah	20.000.000,00	13.986.000,00	6.093.000,00	20.079.000,00	100,40	79.000,00
		2. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Taman Kuliner)	3.232.125.200,00	2.995.145.050,00	297.498.500,00	3.292.643.550,00	101,88	60.439.350,00
16	1 16 1 16 01	KANTOR P3M						
	4 1 4 14 02	Lain-lain PAD	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00	0,00
		1 - Kontribusi KP2KS	0,00	152.500.000,00	30.500.000,00	183.000.000,00	#DIV/0!	183.000.000,00
		- Kontribusi Aman	0,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	#DIV/0!	42.500.000,00
		- Kontribusi Mekar	0,00	9.818.550,00	7.677.450,00	17.496.000,00	#DIV/0!	17.496.000,00
		- Kontribusi dari Nakersos	0,00	9.710.000,00	27.905.000,00	37.615.000,00	#DIV/0!	37.615.000,00
		- Kontribusi dari Perindagkop	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	#DIV/0!	350.000,00
		- Kontribusi dari Parwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		2. Jasa Giro Penguatan Modal	105.000.000,00	277.028.550,00	108.932.450,00	385.961.000,00	367,58	280.611.000,00
		Jumlah 16	105.000.000,00	277.028.550,00	108.932.450,00	385.961.000,00	367,58	280.611.000,00
17	1 08 1 08 01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP						
	4 1 2 02 15	- Retribusi Pembuangan Air Limbah	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.820.000,00)
		Jumlah 17	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.820.000,00)

